



# **DAFTAR ISI**

Pernyataan Telah Direviu	1
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I	1
BAB II	21
BAB III	52
Misi I	62
Misi II	90
Misi III	121
Misi IV	139
Misi V	151
BAB III EFISIENSI ANGGARAN	158
BAB IV	183
LAMPIRAN	186



#### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 28 Maret 2024 TIM PENILAI INTERNAL INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005



#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur ke Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat dan stake holder, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Sidoarjo, 30 Maret 2024

BUPATI SIDOARJO

AD MUHDLOR, S.IP



#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga (ke–3) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keSangat Baikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dapat tercapai dengan baik, dari 6 tujuan yang mencakup 9 indikator dan 13 sasaran yang mencakup 31 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 125,49% atau bermakna

#### SANGAT BAIK.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 9 Indikator Kinerja Tujuan, 13 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran tahun ketiga (2023) periode perencanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Misi I terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:



No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Sangat Baik

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 8 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Sangat Baik
2.	Opini Atas Audit BPK	Sangat Baik
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Belum ada rilis
4.	Status Kinerja LPPD	Baik
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Sangat Baik
6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Baik
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Sangat Baik
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Baik

- b) Misi II terdapat 2 tujuan, 4 indikator kinerja tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Sangat Baik
2.	Indeks GINI	Sangat Baik
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Sangat Baik
4.	Persentase Penduduk Miskin	Sangat Baik



b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 9 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Persentase Kontribusi PDRB	Sangat Pails
1.	Sektor Perdagangan	Sangat Baik
2.	Persentase Kontribusi PDRB	Sangat Rails
۷.	Sektor Industri	Sangat Baik
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor	Kurang
3.	Pertanian dalam arti luas.	Kurang
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai	Kurang
'•	Investasi	Kurang
5.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Sangat Baik
6.	Persentase Koperasi Berkualitas	Sangat Baik
7.	Persentase Desa Mandiri	Sangat Baik
8.	Persentase Tenaga Kerja Yang	Sangat Baik
0.	Terserap di sembilan sektor	bangat bank
9.	Persentase penduduk diatas Garis	Sangat Baik
9.	Kemiskinan (GK)	Dangar Dan

- c) Misi III terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Lingkungan	Sangat Baik
	Hidup (IKLH)	oungut Buni

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 7 indikator sasaran , dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

Ī	No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan	Sangat Baik

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
	Umum	
2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Sangat Baik
3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Sangat Baik
4.	Indeks Kualitas Air	Sangat Baik
5.	Indeks Kualitas Udara	Sangat Baik
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Sangat Baik
7.	Indeks Resiko Bencana	Sangat Baik

- d) Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Sanget Dails
	(IPM)	Sangat Baik

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sangat Baik
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Sangat Baik
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Sangat Baik
4.	Indeks Pembangunan Gender	Belum ada rilis
	(IPG)	Boldin add Tillo

- e) Misi V terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran:
  - a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Sangat Baik

b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Toleransi	Sangat Baik
2.	Indeks Pelestarian Budaya	Sangat Baik
3.	Indeks Rasa Aman	Sangat Baik

Berdasarkan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis pencapaian terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 9 (sembilan) indikator dalam katagori Sangat Baik. Jika diratarata capaian kinerja tujuan tercapai 117,77% atau Sangat Baik.
- 2) Hasil analisis pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 26 (Dua Puluh Enam) indikator sasaran dinilai Sangat Baik, 1 (satu) indikator katagori Baik, 2 (dua) indikator dalam katagori Kurang, dan 2 (dua) indikator yang belum dirilis hasilnya oleh Kementrian atau lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilain diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 103% atau dalam katagori Sangat Baik. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 110%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Sangat Baik.



## BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun



anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban. Disamping itu juga merupakan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan teerhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

# 1.2 Penjelasan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

### 1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

#### 1) Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3° – 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5° – 112,9° BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km2 ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara



keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota "Delta", dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Tabel 1. 1 Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	318	28

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024





Gambar 1.1: Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- a. 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur;
- b. 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar; dan
- c. 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan



sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel 1. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	62.56
2	Buduran	41.03
3	Candi	40.67
4	Porong	29.82
5	Krembung	29.55
6	Tulangan	31.21
7	Tanggulangin	32.29
8	Jabon	81.00
9	Krian	32.50
10	Balongbendo	31.40
11	Wonoayu	33.92
12	Tarik	36.06
13	Prambon	34.22
14	Taman	31.54
15	Waru	30.32
16	Gedangan	24.06
17	Sedati	79.43
18	Sukodono	32.68

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2024

BMKG mencatat selama Januari-Desember 2023 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 130 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Januari dan Februari masing-masing 27 hari hujan. Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Febaruari, sebesar 539,3 mm dengan hari hujan sebanyak 28 hari. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 84,7 mm dengan 7 hari hujan dan di bulan Juni menjadi 5.3 mm dengan 2 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan Desember, sebesar 215,0 mm dengan hari hujan sebanyak 13 hari.



Tabel 1. 3 Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023

	Jumlah Curah	Jumlah Hari	Penyinaran
Bulan	Hujan	Hujan	Matahari
	(mm/tahun)	(hari)	(jam)
Januari	317.6	27.0	6.5
Februari	539.3	27.0	4.9
Maret	199.5	22.0	4.8
April	373.4	22.0	3.5
Mei	84.7	7.0	5.2
Juni	5.3	2.0	5.2
July	0.4	1.0	7.4
Agustus	••••		8.2
Septembe			8.1
r	••••	••••	
Oktober	••••		9.2
November	13.8	6.0	9.1
Desember	222.5	16.0	9.3

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2024

#### 2) Kondisi Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

2.080.000
2.060.000
2.040.000
2.020.000
2.020.000
1.980.000
1.960.000
1.940.000
1.920.000
1.900.000

Grafik1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

2022

2023

2021

2020

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan / Desa /	Jenis :	Kelamin	Jumlah
-10	Kelurahan	Laki Laki	Perempuan	- C
1	TARIK	34.009	33.449	67.458
2	PRAMBON	39.650	38.810	78.460
3	KREMBUNG	34.209	34.193	68.402
4	PORONG	35.282	34.888	70.170
5	JABON	27.701	27.452	55.153
6	TANGGULANGIN	43.601	43.560	87.161
7	CANDI	76.901	77.021	153.922
8	SIDOARJO	98.027	99.729	197.756
9	TULANGAN	50.737	50.440	101.177

10	WONOAYU	42.245	41.519	83.764
11	KRIAN	65.942	64.470	130.412
12	BALONGBENDO	37.461	36.472	73.933
13	TAMAN	100.366	100.039	200.405
14	SUKODONO	61.383	60.571	121.954
15	BUDURAN	49.530	49.469	98.999
16	GEDANGAN	59.289	59.049	118.338
17	SEDATI	47.751	47.526	95.277
18 WARU		95.983	98.101	194.084
	JUMLAH	1.000.067	996.758	1.996.82 5

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Sumber
Data:
Data
Perempuan
49,92%
Laki-Laki
50,08%

Grafik 1.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2023

Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

#### 3) Kondisi Demografis

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 273,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 28,5 triliun rupiah dibandingkan tahun



2022 yang mencapai 245,14 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di seluruh lapangan usaha pasca pandemi covid 19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 151,57 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 160,09 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 terjadi percepatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 6,17 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tahun 2023 sebesar 6,17 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022 yang pertumbuhannya sebesar 7,57 persen. Salah satu indikator pendukung perlambatan adalah melambatnya pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo antara lain transportasi dan pergudangan yang hanya tumbuh 22,14 tahun 2023 dan 45,32 persen pada tahun 2022.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2023 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :

Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.159,73	2.730,83
2	Pertambangan dan Penggalian	74,26	42,92
3	Industri Pengolahan	133.046,50	83.869,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.695,73	1.553,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	148,77	122,15
6	Konstruksi	18.670,37	12.543,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	44.281,52	25.886,02
8	Transportasi dan Pergudangan	37.086,34	11.843,89

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.624,88	5.942,85
10	Informasi dan Komunikasi	8.957,99	7.844,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.056,07	1.728,97
12	Real Estate	2.240,10	1.546,35
13	Jasa Perusahaan	378,35	235,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.963,95	2.215,42
15	Jasa Pendidikan	2.708,26	1.783,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	800,49	536,06
17	Jasa Lainnya	804,76	525,99
	TOTAL	273.698,07	160.950,78

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

#### 1.2.2 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.



Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Bagian Pemerintahan
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - c. Bagian Hukum
- 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
  - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - b. Bagian Pembangunan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Asisten Administrasi Umum
  - a. Bagian Organisasi
  - b. Bagian Umum
  - c. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;

- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

#### e. Badan Daerah terdiri dari:

1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang



- bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
- 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
- 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain:
  - 1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
  - 2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
  - 3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
  - 4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
  - 5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
  - 6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
  - 7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
  - 8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
  - 9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
  - 10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
  - 11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
  - 12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
  - 13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
  - 14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;
  - 15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
  - 16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
  - 17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
  - 18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.



Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- a) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- b) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- c) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

#### 1.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan



kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

Tabel 1.6 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

No	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	91	86	194
2	Sekretariat DPRD	5	42	9	56
3	Inspektorat	7	18	54	79
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	389	7.700	8.106
5	Dinas Kesehatan	28	188	1.634	1.850
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	8	66	14	88
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	30	10	48
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7	21	59	87
9	Dinas Sosial	6	15	14	35
10	Dinas Tenaga Kerja	6	10	17	33
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	8	25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7	10	7	24
13	Dinas Pangan dan Pertanian	10	49	109	168
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	227	15	249
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	26	20	51
16	Dinas Perhubungan	14	59	18	91
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	40	14	61
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5	24	3	32
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	15	10	30
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5	42	6	53
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	15	14	35
22	Dinas Perikanan	4	25	5	34
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	130	18	154
24	Badan Perencanaan	7	24	17	48



	Pembangunan Daerah				
25	Badan Pengelolaan Keuangan	6	53	9	68
	dan Aset Daerah				08
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	6	74	11	91
27	Badan Kepegawaian Daerah	7	34	20	61
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	2	21
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	52	32	90
30	Rumah Sakit Umum Daerah	25	109	1.036	1.170
31	Kecamatan Sidoarjo	38	41	2	81
32	Kecamatan Candi	5	16	1	22
33	Kecamatan Buduran	7	12	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	13	1	22
35	Kecamatan Sedati	7	14	1	22
36	Kecamatan Waru	4	16	2	22
37	Kecamatan Taman	22	29	2	53
38	Kecamatan Sukodono	7	11	2	20
39	Kecamatan Wonoayu	6	15	1	22
40	Kecamatan Krian	10	18	0	28
41	Kecamatan Balongbendo	4	18	1	23
42	Kecamatan Tarik	6	18	1	25
43	Kecamatan Tulangan	8	16	1	25
44	Kecamatan Prambon	10	18	1	29
45	Kecamatan Krembung	7	16	1	24
46	Kecamatan Tanggulangin	8	16	1	25
47	Kecamatan Jabon	5	11	1	17
48	Kecamatan Porong	12	20	1	33
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	22	251	286
50	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	2	0	0	2
	TOTAL	447	2.243	11.244	13.934
	•		III		

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.



#### 1.2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

		J	UMLAH BAR	ANG	NILAI BARANG		
NO	NAMA OPD	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	4.293	1.651	5.944	188.224.654.526,30	9.292.629.317,85	197.517.283.844,15
2	SEKRETARIAT DPRD	4.323	145	4.468	57.034.921.413,00	866.951.014,00	57.901.872.427,00
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD	296.217	69.062	365.279	2.464.602.218.396,47	175.717.773.164,09	2.640.319.991.560,56
4	DINAS KESEHATAN	33.843	11.473	45.316	568.845.541.586,60	41.316.311.715,62	610.161.853.302,22
5	DINAS PUBM SDA	4.248	586	4.834	12.243.113.466.255,7 0	216.845.543.894,23	12.459.959.010.149,9 0
6	DINAS P2CKTR	2.673	214	2.887	5.940.122.246.034,80	1.411.404.620,00	5.941.533.650.654,80
7	SATPOL PP	965	284	1.249	29.341.729.547,81	725.959.250,00	30.067.688.797,81
8	DINAS SOSIAL	1.232	89	1.321	51.220.055.417,43	527.474.332,00	51.747.529.749,43
9	DINAS TENAGA KERJA	644	36	680	8.095.440.053,00	778.309.846,00	8.873.749.899,00
10	DINAS P3AKB	1.319	215	1.534	21.081.708.053,40	2.017.807.180,56	23.099.515.233,96
11	DINAS PANGAN P	2.667	16	2.683	107.851.341.474,22	841.750.875,00	108.693.092.349,22
12	DLHK	5.554	1.361	6.915	679.685.060.437,22	13.804.000.113,23	693.489.060.550,45
13	DISPENDUKCAPIL	815	242	1.057	19.574.875.973,28	3.494.000.980,44	23.068.876.953,72
14	DISHUB	8.136	124	8.260	443.812.892.578,74	7.408.236.275,00	451.221.128.853,74
15	DISKOMINFO	1.392	96	1.488	64.051.522.499,34	1.057.633.399,00	65.109.155.898,34
16	DINAS KOPERASI	647	106	753	26.319.592.090,33	404.313.293,00	26.723.905.383,33
17	DPMPTSP	1.509	316	1.825	204.295.942.837,98	1.163.785.863,00	205.459.728.700,98
18	DISPORA	1.341	298	1.639	46.457.086.259,43	22.145.258.229,00	68.602.344.488,43
19	DINAS PERPUSTAKAAN	33.938	289	34.227	29.288.040.336,29	544.856.464,94	29.832.896.801,23
20	DINAS PERIKANAN	1.703	364	2.067	272.071.759.255,22	3.391.761.113,10	275.463.520.368,32
21	DISPERINDAG	3.013	870	3.883	760.766.258.253,67	5.748.305.095,89	766.514.563.349,56
22	BAPPEDA	1.183	200	1.383	11.011.171.319,00	1.618.534.309,00	12.629.705.628,00
23	BPKAD	1.901	187	2.088	514.196.059.448,04	9.374.933.817,00	523.570.993.265,04
24	BPPD	2.435	501	2.936	38.292.789.059,82	3.627.200.067,40	41.919.989.127,22
25	BKD	1.892	136	2.028	36.891.372.590,00	526.273.357,00	37.417.645.947,00
26	BAKESBANG	652	649	1.301	12.353.532.566,27	1.658.626.224,00	14.012.158.790,27
27	BPBD	821	592	1.413	38.292.789.059,82	7.341.447.789,72	45.634.236.849,54
28	RSUD SIDOARJO	32.523	2.419	34.942	1.400.894.399.771,20	19.749.988.487,68	1.420.644.388.258,88
29	INSPEKTORAT	865	123	988	19.628.293.477,26	865.599.172,00	20.493.892.649,26
30	DINAS PMD	1.030	94	1.124	8.388.372.505,00	490.568.000,00	8.878.940.505,00
31	RSUD SIBAR	7.366	-	7.366	314.613.280.442,00		314.613.280.442,00

1	İ	ı	ı	İ	1 1		1
32	KEC. SIDOARJO	3.974	239	4.213	140.262.894.508,84	245.371.800,00	140.508.266.308,84
33	KEC. CANDI	685	405	1.090	10.142.563.253,71	1.080.844.850,84	11.223.408.104,55
34	KEC BUDURAN	432	248	680	6.599.004.493,00	340.450.467,00	6.939.454.960,00
35	KEC GEDANGAN	573	212	785	813.823.072.300,00	38.812.177.184,00	852.635.249.484,00
36	KEC SEDATI	507	453	960	6.247.766.011,00	700.788.254,84	6.948.554.265,84
37	KEC WARU	605	221	826	12.757.682.459,75	428.347.445,84	13.186.029.905,59
38	KEC TAMAN	2.698	1.476	4.174	118.563.880.738,00	2.885.954.591,84	121.449.835.329,84
39	KEC. KRIAN	1.671	21	1.692	54.357.537.919,00	269.088.710,00	54.626.626.629,00
40	KEC. WONOAYU	501	199	700	6.637.452.478,00	432.936.867,00	7.070.389.345,00
41	KEC. BALONGBENDO	513	442	955	9.549.345.852,00	510.973.336,00	10.060.319.188,00
42	KEC. SUKODONO	711	412	1.123	19.617.896.654,95	553.460.101,84	20.171.356.756,79
43	KEC. TARIK	734	32	766	8.329.285.647,84	76.620.000,00	8.405.905.647,84
44	KEC TULANGAN	337	201	538	8.072.593.424,00	324.974.350,00	8.397.567.774,00
45	KEC PRAMBON	829	204	1.033	8.840.077.936,54	272.989.250,00	9.113.067.186,54
46	KEC. KREMBUNG	598	69	667	8.229.004.735,84	106.010.550,00	8.335.015.285,84
47	KEC. TANGGULANGIN	812	183	995	907.733.127.948,00	47.673.117.914,00	955.406.245.862,00
48	KEC. JABON	263	15	278	8.471.772.896,00	188.776.650,00	8.660.549.546,00
49	KEC. PORONG	1.052	53	1.105	30.966.188.572,37	2.258.821.575,00	33.225.010.147,37
		478.635	97.823	576.458	28.799.619.561.348	651.918.941.158	29.451.538.502.505

Sumber Data: BPKAD Kab. Sidoarjo tahun 2023

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Sidoarjo di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja cukup mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

#### 1.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Sidoarjo tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut:

- Belum terselenggaranya tata kelola Kelola Pemerintahan yang Bersih,
   Transparan dan Tangkas Berbasis Digital;
- 2. Pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha;
- Kurangnya informasi terkait lapangan kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha sehingga penyerapan tenaga kerja belum maksimal;
- 4. Belum adanya penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 5. Penurunan presentase penduduk diatas garis kemiskinan masih menjadi prioritas;
- Kualitas sarana prasaran kesehatan dan tenaga kesehatan belum merata;
- 7. Jaminan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan belum menyeluruh dan terintegrasi, sehingga akses susah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8. Infrastruktur belum berkualitas dan merata;
- System pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum efektif dan efisien sehingga masih rendahnya kualitas lingkungan hidup;
- Kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo belum optimal;
- 11. Belum adanya integrasi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan sektor strategis (pariwista, pertanian modern, perikanan dan jasa);



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama - sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026. Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya yakni tahun 2016 - 2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021 – 2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 - 2025, maka rumusan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026, yakni:

## "TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN"

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

a) **Sidoarjo Sejahtera**; Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin



diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

- b) **Sidoarjo Maju**; Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan dtingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c) Sidoarjo Berkarakter; Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Develompement atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- d) **Pembangunan Berkelanjutan**; Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.



Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pokok - Pokok Visi Kabupaten

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya	Sidoarjo	Sidoarjo Sejahtera
Kabupaten	Sejahtera	menggambarkan kondisi
Sidoarjo yang		masyarakat yang terpenuhi
Sejahtera,		kebutuhan secara ekonomi,
Maju,		sosial, politik dan keamanan
Berkarakter		serta segala aspek kehidupan
dan		lainnya. Hal ini dicerminkan
Berkelanjutan"		dari tingkat pendapatan
		perkapita, Indeks Pembangunan
		Manusia serta berbagai
		indikator lainnya seperti
		kualitas pendidikan, dan
		kesehatan. Pembangunan yang
		ingin diwujudkan dalam Visi ini
		tidak hanya berorientasi pada
		pertumbuhan ( <i>growth</i> ) semata,
		namun juga akan ditekankan
		pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan
		agar hasil-hasil pembangunan
		tidak hanya menjadi milik
		kelompok masyarakat tertentu,
		namun menjadi hak seluruh
		masyarakat Kabupaten Sidoarjo
		tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan
	ziuou.jo muju	manifestasi dari diksi
		"menjemput Perubahan". Segala
		sumberdaya pemerintahan dan
		sumber daya alam akan dikelola
		an diarahkan untuk kemajuan
		Sidoarjo. Kemajuan memiliki
		makna "terwujudnya keadaan
		yang lebih baik dari
		sebelumnya". Sehingga target
		pembangunan yang belum



Г	
	tercapai akan dtingkatkan
	pencapaiannya, dan yang telah
	tercapai akan ditingkatkan
	capaiannya. Segala upaya
	peningkatan capaian
	pembangunan tersebut tidak
	lain untuk kesejahteraan
	Masyarakat Sidoarjo di
	segala bidang.
Sidoarjo	Unsur penting dari konsep
Berkarakter	pembangunan <i>People Centered</i>
	Develompement atau
	pembangunan berpusat pada
	manusia adalah kokoh spiritual,
	mapan intelektual, kompetensi
	handal dan karakteristik sosial
	yang berpegang pada nilai
	agama dan nilai luhur budaya.
	Nilai ( <i>value</i> ) yang mendasari
	semangat juang dan pola hidup
	masyarakat
	memiliki peran penting dalam
	proses pembangunan.
	Karakteristik masyarakat
	kabupaten Sidoarjo yang tegas,
	lugas, namun tetap ramah dan
	hangat menjadi modal teramat
	besar bagi pembangunan
	Kabupaten Sidoarjo ke depan.
Pembangunan	Pembangunan dilaksanakan di
Berkelanjutan	atas prinsip-prinsip
	berkelanjutan (sustainable
	development). Sidoarjo sebagai
	bagian dari masyarakat dunia
	memandang perlu untuk turut
	berperan aktif dalam upaya
	pelestarian lingkungan. Tujuan
	Pembangunan Berkelanjutan
	(SDGs) akan menjadi prinsip
	pembangunan di Kabupaten
	Sidoarjo

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi



dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
"Terwujudnya	Sidoarjo	Misi 2 : Membangkitkan
Kabupaten	Sejahtera	Pertumbuhan Ekonomi dengan
Sidoarjo yang		Fokus pada Kemandirian Lokal
Sejahtera,		Berbasis Usaha Mikro, Koperasi,
Maju,		Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa
Berkarakter		dan Industri Untuk Membuka
dan		Lapangan Pekerjaan dan
Berkelanjutan		Mengurangi Kemiskinan.
"	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola
		Pemerintahan yang Bersih,
		Transparan dan Tangkas Melalui
		Digitalisasi untuk Meningkatkan
		Kualitas Pelayanan Publik dan
		Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo	Misi 4 : Membangun Sumber Daya
	Berkarakter	Manusia Unggul dan Berkarakter
		Melalui Peningkatan Akses
		Pelayanan Bidang Pendidikan,
		Kesehatan serta Kebutuhan Dasar
		Lainnya.
		Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat
		Religius yang Berpegang Teguh
		pada Nilai-Nilai Keagamaan serta
		Mampu Menjaga Kerukunan
	D 1	Sosial Antar Warga.
	Pembangunan	Misi 3: Membangun Infrastruktur
	Berkelanjuta	Ekonomi dan Sosial yang Modern
	n	dan Berkeadilan dengan
		Memperhatikan Keberlanjutan
		Lingkungan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak



pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut:

# a) Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

# b) Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan



melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

## c) Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

# d) Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait



dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas

# e) Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai- nilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026. Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, juga dipaparkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut:

- 1. 100.000 Lapangan kerja baru
- 2. BPJS kesehatan gratis seluruh warga
- 3. Gratis makanan tiap hari warga miskin



- 4. 10.000 beasiswa kuliah
- 5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama
- 6. Rp. 5juta 50juta modal usaha mikro perempuan
- 7. Rp. 6juta operasional bagi RT
- 8. 20.000 UMKM naik kelas
- 9. Penataan Kota dan transportasi terpadu urau kemacetan
- Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu
- 11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer
- 12. Youth center, bangunan pusat kreativitas anak muda
- 13. 2.000 warung rakyat direnovasi
- 14. Tingkatkan ADD untuk Desa sejahtera
- 15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat
- 16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif
- 17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

## 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Adapun tujun beserta indicator pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan. Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan dengan Indikator kinerja: a) Pertumbuhan Ekonomi; b) Indeks Gini; c)



- Tingkat pengangguran terbuka; d) Prosentase penduduk miskin.
- 3) Meningkatnya insfrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur; b) Indeks kualitas lingkungan hidup.
- 4) Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan manusia (IPM).
- 5) Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilainilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat Indikator kinerja Indeks kesalehan social.

#### b) Sasaran

- Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital dengan Indikator kinerja: a) Nilai SAKIP Kabupaten; b) Opini Atas Audit BPK; c) Survey eksternal persepsi korupsi; d) Status Kinerja LPPD; e) Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); f) Indeks inovasi daerah; g) Tingkat Maturitas SPIP.
- 2) Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kemudahan berusaha. dengan Indikator kinerja Indeks pelayanan publik
- 3) Berkembangnnya perdagangan, industri, investasi, pertanian dan perikanan dengan Indikator kinerja: a) Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan; b) Persentase kontribusi PDRB sektor industri; c) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas; d) Persentase pertumbuhan nilai investasi.
- 4) Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa dengan Indikator kinerja: a) Persentase usaha mikro mandiri;



- b) Persentase koperasi berkualitas; c) Persentase desa mandiri.
- 5) Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dengan Indikator kinerja Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor.
- 6) Menurunnya penduduk miskin dengan Indikator kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (GK)
- 7) Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan indikator Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur pekerjaan umum; b) Indeks infrastruktur pendidikan; c) Indeks infrastruktur kesehatan.
- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana dengan Indikator kinerja: a) Indeks kualitas air; b) Indeks kualitas udara; c) Indeks kualitas tutupan lahan; d) Indeks resiko bencana.
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan Indikator kinerja: a) Harapan lama sekolah (HLS); b) Ratarata lama sekolah (RLS).
- 10) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan Indikator kinerja Usia harapan hidup (UHH)
- 11) Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan gender (IPG).
- 12) Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam masyarakat dengan Inidkator kinerja: a) Indeks toleransi; b) Indeks pelestarian budaya.
- 13) Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram dengan Indikator kinerja Indeks Rasa Aman.

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel:



Tabel 2. 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

			-	
Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
		Tujuan		Sasaran
Misi-1:  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata  Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten  Opini atas Audit BPK  Survey Eksternal Persepsi Korupsi  Status Kinerja LPPD  Nilai Indeks SPBE  Indeks Inovasi Daerah  Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi-2:  Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi,	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan  Persentase kontribusi PDRB sektor industri

Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas  Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri  Persentase koperasi berkualitas  Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  Persentase	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran Menurunnya	Persentar tenaga kerja yang teserap di semblan sektor
		penduduk miskin	Penduduk miskin	penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3:  Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Indeks Infrastruktur Pendidikan
Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan				Indeks Infrasstruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air



		Lingkungan Hidup	Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Resiko Bencana
Misi-4:  Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat  Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat  Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  Usia Harapan Hidup (UHH)  Indeks Pembangunan Candar (IDC)
Lainnya  Misi-5:  Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai- Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat  Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Gender (IPG)  Indeks Toleransi  Indeks Pelestarian Budaya  Indeks Rasa Aman

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026



Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 -2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

## 1) Keselarasan Kinerja MISI – 1

Misi 1	Tangkas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.				
	Tujuan	Transpara	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.			
		Sasaran  1 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerint yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berl Digital.				
		Sasaran 2 Terselenggaranya Pelayanan Publik y Berkualitas dan Rangka Menduk Kemudahan Berusaha.				



## 2) Keselarasan Kinerja MISI – 2

Misi 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.			
	Tujuan Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong  Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.			
	1		Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan. Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	
			ya Lapangan Kerja yang berdampak pada Ilangan Kemiskinan.	
	Sasaran 3 Sasaran 4		Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran. Menurunnya Penduduk Miskin.	

# 3) Keselarasan Kinerja MISI – 3

Misi 2	Membar	ngun Infras	gun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan				
Misi 3	Berkead	ilan dengar	an dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.				
		Meningkat	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi				
	Tujuan	Sosial ya	Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip				
		Pembangunan Berkelanjutan.					
		Sasaran Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas da					
		1 Merata.					
		Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup da					
		Penanganan Terhadap Bencana.					



### 4) Keselarasan Kinerja MISI - 4

Misi 4	Peningk	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.			
	Tujuan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.			
		Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.			
		Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyara			
		Sasaran 3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat		

## 5) Keselarasan Kinerja MISI – 5

	Misi 5	_	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai- Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.			
•		Tujuan	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.			
			Sasaran Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.			
			Sasaran Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.			

#### 2.1.3 Strategi

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

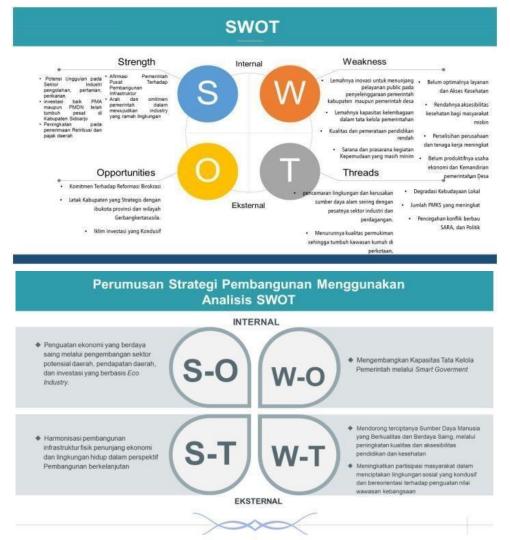


Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut:

#### Gambar 2.1: SWOT

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut:

a) Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdayasaing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis eco Industri. Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor



potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar



pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh positif.

- b) Strategi S-T; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifikatas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep Sustainable Development, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- c) Strategi W-O; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan



kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertangungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengakolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan managemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder.

- d) Strategi W-T (1); yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, kesehatan terjadinya penyakit pemulihan dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh masvarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Kabupaten Masyarakat secara merata.
- e) Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan. pada strategi ini mencipatkan adanya social sustainabilty, prinsip

utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, social inclusion and interaction, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan tatakelola Pemerintahan dan Inovasi pelayanan publik.
- 2) Penguatan ekonomi sektor strategis simultan dengan percepatan ekonomi kerakyatan.
- 3) Pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu.
- 4) Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development).
- 5) Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai spirit pembangunan.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

#### 2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5

(lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan



Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022-2026. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu



strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

### 2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

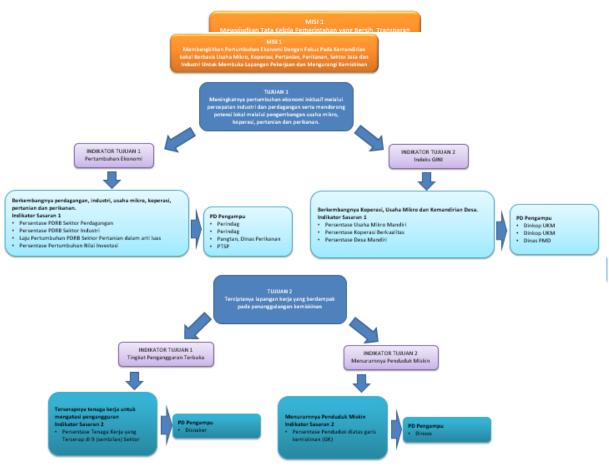
No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Petumbuhan Ekonomi
3.	Indeks Gini
4.	Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT)
5.	Persentase Penduduk Miskin
6.	Indeks Infrastruktur
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8.	Indeks Pembangunan Manusia
9.	Indeks Kesalehan Sosial

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

### 2.1.6 Cascading Kinerja

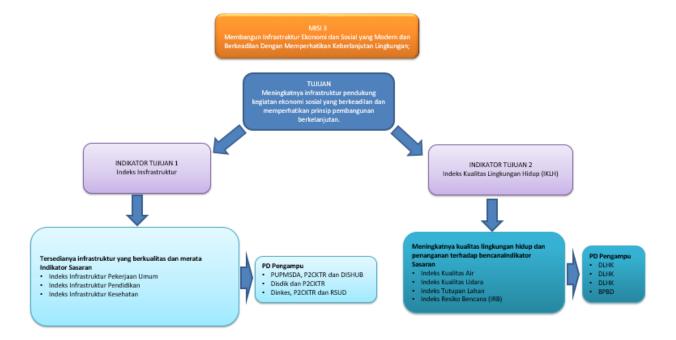
Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan berjenjang dalam mencapai kinerja utama memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

a) Cascading Kinerja Misi 1

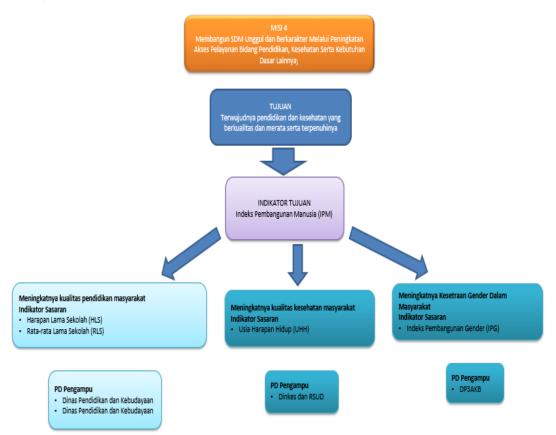


- b) Cascading Kinerja Misi 2
- c) Cascading Kinerja Misi 3



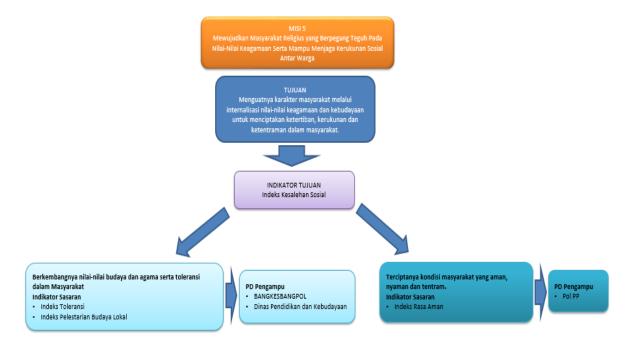


## d) Cascading Kinerja Misi 4





### e) Cascading Kinerja Misi 5

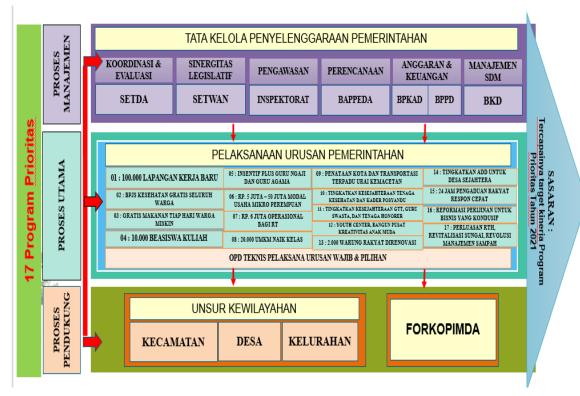


#### 2.1.7 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alur dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya. Bisnis Proses Model dan Notasi:



Gambar 2.1 Peta Proses Bisnis





#### 2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

#### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;



- c) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Sidoarjo di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha						
	Tujuan 1:  Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	В				
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis	Nilai SAKIP Kabupaten	A				
	Digital Digital	Opini Atas Laporan BPK	WTP				
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,73				
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi				
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,45				

		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik
	Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ek Kemandirian Lokal Berbasis Usak Perikanan, Sektor Jasa dan Indu Pekerjaan dan Mengurangi Kemis	na Mikro, Koperasi, Pert stri untuk Membuka Lap	anian,
	<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui	Pertumbuhan Ekonomi	1,00
	Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Indeks Gini	0,365
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,09
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,73
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,55
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87

		Persentase Koperasi Berkualitas	21,84
		Persentase Desa Mandiri	10.25
	<b>Tujuan 3 :</b> Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,54
	Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,71
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,17
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78
	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekono Berkeadilan dengan Memperhatik	• •	
	Tujuan 4:	Indeks Infrastruktur	0,755
	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,79
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,748
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13
8	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas Air	51,52
	Lingkungan Hidun dan		,
	Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Udara	85,14
		Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan	

		Indeks Resiko Bencana	99,12
	Misi 4 :  Membangun Sumber Daya Manus	ia Unggul dan Berkarakt	er Melalui
	Peningkatan Akses Pelayanan Bid Kebutuhan Dasar Lainnya		
	<b>Tujuan 5 :</b> Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,33
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32
	Misi 5:  Mewujudkan Masyarakat Religius Nilai Keagamaan serta Mampu Mo Warga.		_
	Tujuan 6: Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	82,01
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi	Indeks Toleransi	77,64
	dalam Masyarakat	Indeks Pelestarian Budaya	60,32
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	76,48



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kineria Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan Visi: "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan". Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penyelenggaraan pembangunan yang dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan Indikator Kinerja yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten SidoarjoTahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagi berikut:

• Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capain kinerjanya, dengan rumus:



Persentase Capaian kinerja = Realisasi 
$$X$$
 100

Target

• Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten SidoarjoTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat baik
2	80,01% s.d kurang dari 90%	Baik
3	70,01% s.d kurang dari 80%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Sumber: PERBUP NO. 106 TAHUN 2022

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-3 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah 117%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebesar 107%, yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun data detail hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	IN	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA			
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha									
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha								
	Indikator Kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	Katagori	BB (70,1)	BB) (75,38)	107,53%	MENPAN RB			
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (77,5)	95,68%	MENPAN RB			
	yang Bersih, Transparan dan	2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100%	BPK			
	Tangkas Berbasis Digital	3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*)	89,76%	KPK			
		4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90%	BPKP			
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,14	91%	MENPAN RB			
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	MENPAN RB			
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100%	BPK			
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A-	A-	100%	MENPAN RB			
	MISI 2	Kop	nbangkitkan Pertumb Perasi, Pertanian, Per Igurangi Kemiskinan	ikanan, Sekto	or Jasa dan Ind	lustri untuk Mer	nbuka Lapang	an Pekerjaan dan			
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertu Mendorong Potensi								

	Indikator Kinerja :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	2,89	6,16	213,15%	BPS
		2.	Indeks Gini	Indeks	0,347	0,359	96,54%	BPS
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,22	16,08	99,14%	BPS
	dan Perikanan	2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,81	52,11	98,67%	BPS
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,82	1,67	59,22%	BPS
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,25	-(2,87)	44,00%	BKPM
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,98	2,06	104,04%	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24,69	24,96	101,09%	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	13,98	47,80	341,92%	KEMENDES
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapan	gan Kerja ya	ng berdampak	k pada Penang	gulangan Kemi	skinan
	Indikator Kinerja	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	10,09	8,05	126,15%	BPS
		2.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,4	5,00	107,41%	BPS
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,91	91,95	102,27%	BPS

6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,60	95,00	100,42%	BPS
	MISI 3		mbangun Infrastrul mperhatikan Keberla			al yang Mode	rn dan Berk	eadilan dengan
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infra				Sosial yang Be	rkeadilan dan
			Memperhatikan Pr				T	
	Indikator Kinerja	1.	Indeks	Indeks	0,772	0,843	109,20%	BPS
			Infrastruktur					
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,81	58,99	98,63%	BPS
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,760	0,823	108,29%	BAPPEDA
	Merata	2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	86,60	95,60	110,39%	BAPPEDA
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	80,91	111,88%	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,54	54,32	105,39%	DLHK
	Hidup dan Penanganan	2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,16	81,98	96,27%	DLHK
	Terhadap Bencana	3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,12	24,42	90,04%	DLHK
		4.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92,53	98,12	93,96%	BNPB
	MISI 4		mbangun Sumber Da ayanan Bidang Pend	idikan, Kese	hatan serta K	ebutuhan Dasa	r Lainnya	
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendi	dikan dan K	esehat <mark>an yan</mark>	g Berkualitas d	an Merata seri	ta
			Terpenuhinya Kebi	ituhan Dasa	r Lainnya			



	Indikator Kinerja	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,92	81,88	101,19%	BPS
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,41	14,97	97,14%	BPS
	Masyarakat	2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,23	10,78	95,99%	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,19	75,36	100,23%	BPS
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,95	94,68*)	99,72%	BPS
	MISI 5		wujudkan Masyarak mpu Menjaga Keruk			ng Teguh pad	a Nilai-Nilai Ke	eagamaan serta
	MISI 5 TUJUAN 6			unan Sosial <i>I</i> ter Masyaral	Antar Warga. kat melalui In	ternalisasi Nila	ai-Nilai Keagam	aan dan
			mpu Menjaga Kerukt Menguatnya Karak kebudayaan untuk	unan Sosial <i>I</i> ter Masyaral	Antar Warga. kat melalui In	ternalisasi Nila	ai-Nilai Keagam	aan dan
12.	TUJUAN 6	Ma:	mpu Menjaga Kerukt Menguatnya Karak kebudayaan untuk masyarakat Indeks	unan Sosial A ter Masyaral Menciptaka	Antar Warga. kat melalui In n Ketertiban,	ternalisasi Nila Kerukunan da	ai-Nilai Keagam n Ketentraman	aan dan dalam Bappeda
12.	TUJUAN 6 Indikator Kinerja	Ma: :	mpu Menjaga Kerukt Menguatnya Karak kebudayaan untuk masyarakat Indeks Kesalehan Sosial	unan Sosial A ter Masyaral Menciptaka Indeks	Antar Warga. kat melalui In n Ketertiban, 85,00	ternalisasi Nila Kerukunan da 85,15	ai-Nilai Keagama n Ketentraman	aan dan dalam

Keterangan :
\*) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 pencapaian terhadap 6 (enam) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 5 (lima) indikator dalam katagori Sangat Berhasil, 2 (dua) indikator dalam katagori Berhasil dan terdapat 2 (dua) indikator yang belum dirilis hasilnya. Jika dirata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 118,88% atau Sangat Berhasil. Sedangkan pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran dinilai Sangat Berhasil, 12 (dua belas) indikator katagori Berhasil, 1 (satu) indikator dalam katagori Cukup dan 6 (enam) indikator yang belum dirilis hasilnya oleh Kementrian atau lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilain diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diratarata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 106,93% atau dalam katagori Sangat Berhasil. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 Indikator Kinerja dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 112%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Sangat Berhasil.

Berikut adalah penjabaran terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2	023	Keterangan
	UTAMA		2020	7021		Target	Realisasi	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	В	В	В	BB	BB	Sangat Baik
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,69	4,21	7,53	2,89	6,16	Sangat Baik
3	Indeks Gini	Poin	0,34	0,347	0,373	0,347	0,359	Sangat Baik

4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,97	10,87	8,80	10,09	8,05	Sangat Baik
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,59	5,93	5,36	5,40	5,00	Sangat Baik
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,747	0,793	0,792	0,772	0,843	Sangat Baik
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,78	59,81	57,54	59,81	58,99	Sangat Baik
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,29	80,65	81,02	80,92	81,88	Sangat Baik
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,03	84,23	85	85,15	Sangat Baik

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja kabupaten Sidoarjo tahun 2023, sebagai berikut :

- 1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 7 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 0 target;
- 3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target:
- 4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target; dan
- 5. Target dengan capaian kategori sangat berhasil sebanyak 9 Indikator.

Sedangkan penjabaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKD) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 IKD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Keterangan
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (77,5)	Sangat Baik
2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	Sangat Baik
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*)	Belun Release
4	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	Baik
5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,11	Sangat Baik
6	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Baik
7	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	Sangat Baik
8	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	Sangat Baik
9	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,22	16,08	Sangat Baik
10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,81	50,11	Sangat Baik
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,82	1,67	Kurang
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,25	-(2,87)	Kurang
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,98	2,06	Sangat Baik
14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24,69	24,96	Sangat Baik
15	Persentase Desa Mandiri	%	13,98	47,80	Sangat Baik
16	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,91	91,95	Sangat Baik
17	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,60	95,00	Sangat Baik
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,760	0,823	Sangat Baik
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	86,60	95,60	Sangat Baik
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	80,91	Sangat Baik
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,54	54,32	Sangat Baik

22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,16	81,98	Sangat Baik
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,12	24,42	Sangat Baik
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92,53	98,12	Sangat Baik
25	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,41	14,97	Sangat Baik
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,23	10,78	Sangat Baik
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,19	75,36	Sangat Baik
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,95	94,68*)	Belum Release
29	Indeks Toleransi	Indeks	80,22	83,29	Sangat Baik
30	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	63,58	90,92	Sangat Baik
31	Indeks Rasa Aman	Indeks	78,97	81,86	Sangat Baik

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Sedangkan untuk capaian 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel di atas dapat diketahui:

- 1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 13 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 target;
- 3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 12 target;
- 4. Target dengan capaian Kategori Sangat Baik sebanyak 26 target;
- 5. Target dengan capaian kategori Baik sebanyak 1 target;
- 6. Target dengan capaian kategori Kurang sebanyak 2: dan
- 7. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target. karena belum dirilis oleh kementerian dan lembaga terkait, oleh karena itu angka yang ada pada table dengan symbol \*) merupakan realisasi tahun 2022.



## 3. 1 Analisa Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Misi I

3.1.1.1 Tujuan I: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta
Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan
Berusaha.

#### A. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good and clean governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan terbaru untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, yaitu penguatan dampak dari implementasi Reformasi Birokrasi, melalui Reformasi Birokrasi Berdampak, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Sebagaimana peraturan dimaksud, Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen penilaian, yaitu :

- 1. Reformasi Birokrasi General, yang terbagi menjadi sub komponen penilaian, sebagai berikut :
  - a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
  - b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
  - c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

- e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- g) Tingkat Digitalisasi Arsip
- h) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
- i) Indeks Kualitas Kebijakan
- j) Indeks Reformasi Hukum
- k) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- l) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / Jasa
- m) Indeks Sistem Merit
- n) Indeks Pelayanan Publik
- o) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
- p) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- q) Opini BPK
- r) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
- s) Indeks BerAKHLAK
- t) Survei Penilaian Integritas
- u) Survey Kepuasan Masyarakat
- 2. Reformasi Birokrasi Tematik, yang terbagi menjadi beberapa tematik sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
  - a) Pengentasan Kemiskinan
  - b) Peningkatan Investasi
  - c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dengan fokus Penanganan Stunting
  - d) Pengendalian Inflasi
  - e) Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian sebagaimana tabel berikut :

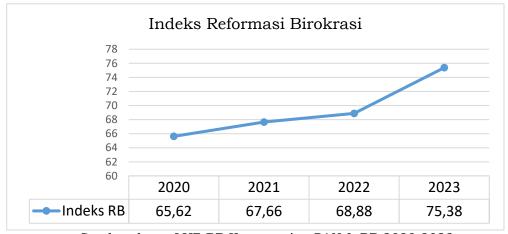
Tabel 3.3 Perolehan Nilai RB tahun 2023

Komponen	Nilai
RB General	65,86
RB Tematik	9,52
Total Nilai (Index RB)	75,38

Sumber: website kemenPAN-RB <a href="https://www.portalrb.id">https://www.portalrb.id</a>

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 telah tercapai memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan Nilai 75,38 dari yang ditargetkan BB (Sangat Baik). Capaian dimaksud terus meningkat, hingga tahun 2022 masih berada pada kategori B dan pada tahun 2023 mencapai BB. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2023 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3. 1 Tren Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2023



Sumber data : LHE RB Kementerian PAN & RB 2020-2023

Dari realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



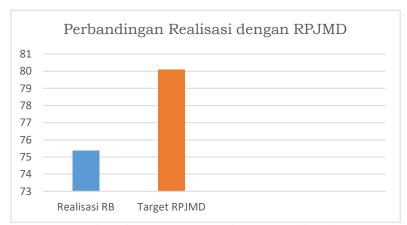
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Reformasi	BB	A	94,1
Birokrasi	(75,38)	(80,1)	

Sumber data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah A atau 80,1 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 75,38 (BB) sehingga persentase capaian nya adalah 94,1%. Dengan demikian untuk mencapai target akhir RPJMD, masih dibutuhkan nilai sebesar 4,72 dalam kurun waktu 3 tahun. Berikut adalah grafik pencapaian Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target RPJMD

Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi RB dengan Target RPJMD



Sumber data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:

#### 1. Kurangnya kepemimpinan yang kuat.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi.

#### 2. Keterbatasan sumber daya.

Implementasi reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan.



#### 3. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan.

Pegawai yang enggan berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.

#### 4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan instansi.

Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan banyak unit kerja maupun instansi pemerintah yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.

#### 5. Masalah hukum dan regulasi.

Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB kedepan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai berikut :

- 1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023;
- 2. Menyusun rencana aksi pembagian peran pada Unit Kerja/Perangkat Daerah untuk masing-masing tema sesuai Road Map Reformasi Birokrasi;
- 3. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis secara daring maupun luring, baik itu melalui zoom meeting maupun pendampingan secara langsung berupa desk ataupun asistensi terkait implementasi RB pada Unit Kerja/Perangkat Daerah;
- 4. Mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah dengan memasukkan nilai SAKIP, IPP, ZI dan RB sebagai komponen penilaian kinerja perangkat daerah untuk digunakan salah satu komponen pemberian *reward and punishment* sebagaimana Perbup Sidoarjo Nomor 106 Tahun 2022;
- 5. Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja/perangkat daerah maupun dengan instansi pemerintah lainnya, sebagai upaya percepatan pelaksanaan RB.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan pertama tersebut yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



dan Kemudahan Berusaha telah didukung oleh 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut :

- 1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital;
- 2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

### A.1 Sasaran I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Sasaran I

	Tabel 3. 3 mulkator Kinerja Sasaran i					
N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (77,5)	95,68	MENPAN RB
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	BPK
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*)	89,76	KPK
4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90	BPKP
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,11	90,14	MENPAN RB
6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	MENPAN RB
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	ВРК

<sup>\*):</sup> Realisasi merupakan realisasi tahun 2022

#### A.1.1 Indikator Kinerja I: Nilai SAKIP Kabupaten

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja

internal. Berikut adalah hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementrian PAN RB Tahun 2023 :

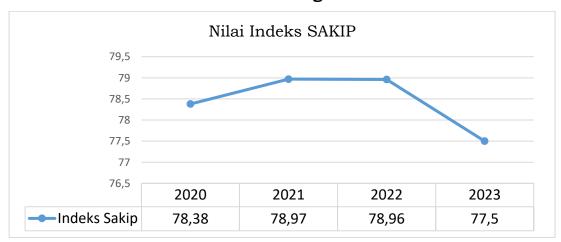
Tabel 3. 6 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
momponen yang annar		2022	2023	
a. Perencanaan Kinerja	30	26,31	26,31	
b. Pengukuran Kinerja	30	23,81	23,18	
c. Pelaporan Kinerja	15	12,34	11,45	
d. Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	16,56	
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,96	77,50	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	

Sumber: LHE SAKIP Kementrian PAN & RB Tahun 2023

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Adapun Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2023 didapatkan sebanyak 1 perangkat Daerah yang mendapatkan katagori AA, 24 Perangkat Daerah yang mendapatkan katagori A, 23 Perangkat Daerah dengan predikat BB, dan 1 Perangkat Daerah dengan katagori B. Adapun perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2023 sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3. 3 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP 2020 - 2023



Sumber data: LHE SAKIP Kementerian PAN & RB 2020-2023



Dari realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Target Akhir 2023 RPJMD		Capaian (%)
Nilai SAKIP Kabupaten	BB (77,5)	AA (90,1)	86,01

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target



Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Berdasarkan perbandingan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo serta dengan target akhir RPJMD di tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan nilai SAKIP. Adapun beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat peningkatan nilai SAKIP Tahun 2023 antara lain :

- 1. Kurangnya komitmen pimpinan
- 2. Belum adanya integrasi data kinerja dalam mendukung mekanisme manajemen kinerja serta mengukur kinerja individu
- 3. Belum Optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan satgas SPIP ke seluruh perangkat daserah
- 4. Belum optimalnya aplikasi e-monev untuk evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan.

Demi mendukung peningkatan kualitas SAKIP di Tahun 2024 maka perlu adanya upaya yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo yaitu :



- Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023 dengan mengkoordinasikan dan menyusun rencana aksi atas rekomendasi dimaksud;
- 2. Melakukan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan SAKIP pada pejabat perencana Perangkat Daerah;
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat setiap tribulan;
- 4. Melakukan reviu penjenjangan kinerja yang sudah ada disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- 5. Upgrading aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
- 6. Memasukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu nilai kinerja perangkat daerah yang berpengaruh pada besaran pemberian TPP (Perbup Sidoarjo nomor 106 Tahun 2022);
- 7. Memberikan reward dan punishment bagi Perangkat Daerah atas nilai SAKIP yang dicapai.

#### A.1.2 Indikator Kinerja II: Opini Atas Laporan BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Dalam kurun waktu 10 tahun Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi ya berlaku umum. Berikut adalah hasil Perolehan Opini BPK pada tahun 2023:



Tabel 3.8 Perolehan Nilai Opini BPK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian oleh BPK Tahun 2023

Berdasarkan hasil Laporan BPK Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa Opini atas Audit BPK sudah berhasil, begitu juga dengan capaian yang sudah memenuhi Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Ahir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100

Sumber data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : Laporan Hasil Penilaian oleh BPK Tahun 2023

Tren capaian Opini atas Audit BPK Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.10 Capaian Opini BPK tahun 2020- 2023

Tahun	Opini atas Audit BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Berdasarkan tren Hasil Penilain Opini BPK Tahun 2020-2023 dan, Kabupaten Sidoarjo harus mempertahankan predikat WTP.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan predikat WTP :

- Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
- 2. Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
- 3. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan.

#### A.1.3 Indikator Kinerja III: Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo masih belum release. Maka data penilaian yang digunakan adalah data Kapabilitas Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, sesuai dengan tabel dibawah:



Tabel 3.11 Perolehan Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	3,42*	89,76

Sumber data : Laporan Hasil Survei oleh KPK Tahun 2022

Hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mendapatkan nilai 85,63 atau (dikoversi **3,42**) dari yang target 2022 sebesar **3,81**, sehingga tercapai **89,76** persen, artinya nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 masih belum tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. begitu juga dengan ketercapaian Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Ahir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	3,95	86,58

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo

Jika dilihat dari capaian Survey Eksternal Persepsi Korupsi dengan nilai **3,81** yaitu masuk dalam **level 3 (Integrated)** yang mencerminkan



bahwa Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo sudah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Berikut Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana grafik berikut:

Kapabilitas APIP

120
100
80
60
40
20
0
2020
2021
2022
2023

Gambar 3.6 Grafik Tren Capaian Kapabilitas APIP 2020-2023

Sumber data : Laporan Hasil Survei oleh KPK Tahun 2022

Berdasarkan ketercapaian Hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi pada tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan nilai Survei.

Berikut kami jabarkan beberapa upaya yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan kapabilitas APIP yaitu :

- 1. Penguatan peran setda sebagai fungsi koordinasi dan kebijakan sebagaimana merujuk pada permendagri nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kaupaten atau Kota, dan Perbup nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja secretariat daerah kabupaten sidoarjo bahwa LPPD menjadi target kinerja setda, Target kinerja masing masing asisten sesuai fungsi koordinasi dan diteruskan menjadi sasaran kinerja kepala bagian sesuai fungsi koordinasi
- 2. Sekretariat LPPD bagian pemerintahan melakukan sosialisasi, pendampingan dibantu oleh masing masing bagian di sekretariat daerah

#### 3. Dilakukan evaluasi berkala dalam perbaikan pencapaian LPPD

#### A.1.4 Indikator Kinerja IV: Status Kinerja LPPD

Dalam menilai kinerja kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Berikut kami jabarkan hasil capaian Kinerja LPPD tahun 2022 :

Tabel 3.13 Perolehan Hasil LPPD

Indikator Kinerja	Target Realisasi 2023		Capaian (%)
Status Kinerja LPPD	4,3	3,78	87,90

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh BPKP Tahun 2022

Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh BPKP, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mendapatkan nilai **3,78** dari yang target 2022 sebesar **4,3**, sehingga tercapai **87,90** persen, artinya Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 masih belum tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, tetapi mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2022. Berikut kami jabarkan tabel perbandingan kenaikan Hasil LPPD tahun 2022 – 2023

Tabel 3.14 Perolehan hasil LPPD 2022 - 2023

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh BPKP Tahun 2022



Sedangkan ketercapaian dengan Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Ahir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Status Kinerja LPPD	3,78	4,00	9,45

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data: Laporan Hasil Penilaian oleh BPKP Tahun 2023

Berdasarkan ketercapaian Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan hasil laporan LPPD.

Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang peningkatan Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) antara lain :

 Penguatan peran setda sebagai fungsi koordinasi dan kebijakan sebagaimana merujuk pada permendagri nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kaupaten atau Kota, dan Perbup nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja secretariat daerah kabupaten sidoarjo bahwa LPPD menjadi



- target kinerja setda, Target kinerja masing masing asisten sesuai fungsi koordinasi dan diteruskan menjadi sasaran kinerja kepala bagian sesuai fungsi koordinasi
- 2. Sekretariat LPPD bagian pemerintahan melakukan sosialisasi, pendampingan dibantu oleh masing – masing bagian di sekretariat daerah
- 3. Dilakukan evaluasi berkala dalam perbaikan pencapaian LPPD

### A.1.5 Indikator Kinerja V : Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masingmasing.

Pada Tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan kategori menjadi B(Baik), berikut kami jabarkan realisasi Indeks SPBE 2023 :

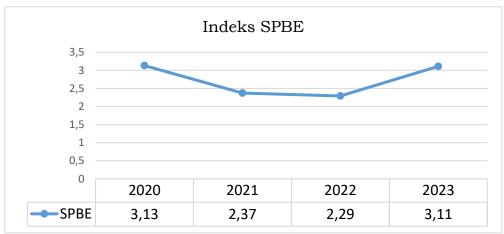
Tabel 3.15 Nilai Indeks SPBE 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,45	3,11	90,14

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **3,11** dari target **3,45** sehingga belum memenuhi target, namun apabila dibandingkan dengan capain tahun 2022 yaitu **2,29** maka terdapat peningkatan yang sangat tinggi yaitu 0,82 poin atau sekitar 35,81%. Berikut perkembangan nilai SPBE Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 3.8 Grafik Tren Nilai Indeks SPBE



Sumber Data: LHE SPBE KEMENPANRB

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai indeks SPBE mnegalami peningkatan signifikan, begitu juga ketercapaian realisasi dengan Target Akhir RPJMD sebesar 4,25 dapat disimpulkan bahwa realisasi 2023 Penjabaran detail dapat dilihat pada tabel dibawah:



Tabel 3.16 Perbandingan realisasi dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,11	4,25	73,18

Sumber Data : RPJMD Kabupaten 2021-2025

Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data: LHE SPBE KEMENPANRB

Melihat grafik diatas realisasi 2023 masih dibawah dari target akhir RPJMD, sehingga harus dilakukan upaya agar penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat, yaitu:

- 1. Menyusun draft Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo direncanakan pada program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator

sesuai dengan ketentuan pada Keputuran Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

#### A.1.6 Indikator Kinerja VI: Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya.

Pada Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mendapat predikat Sangat Inovatif dan berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif. Berikut adalah data realisasi indeks inovasi daerah tahun 2023:

Tabel 3.17 Nilai Indeks Inovasi Daerah 2023

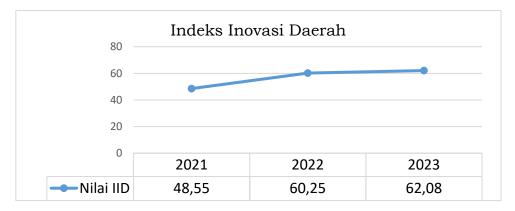
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah	Sangat	Sangat	100
(IID)	Inovatif	Inovatif	

Sumber data : Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Indeks Inovasi Daerah tiap tahun realisasinya meningkat, dapat dilihat tren kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023 seperti pada grafik dibawah :



Gambar 3.10 Grafik Kenaikan IID Tahun 2021-2023



Sumber data : Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Meskipun capaian IID Kabupaten Sidoarjo Th 2023 meningkat, tetapi secara nasional peringkatnya turun dari peringkat 23 (2022) menjadi peringkat 27 (2023). Dikarenakan perkembangan jumlah partisipasi admin perangkat daerah dalam melaporkan inovasi pad aunit kerja masing – masing. Berikut adalah grafik jumlah admin yang melaporkan inovasi dari tahun 2021-2023 :

Gambar 3.11 Grafik Inovasi Terlapor



Sumber data: Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Melihat grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi PD dalam pelaporan inovasi meningkat setiap tahun dari 75% (2021), menjadi 85,71% (2022), dan 87,76% (2023). Serta capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 sangat berhasil dan sudah melampaui target akhir RPJMD. Berikut



adalah penjabaran perbandingan Realisasi IID Tahun 2023 dengan Target AKhir RPJMD :

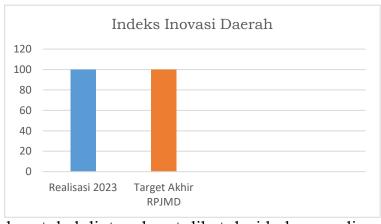
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi IID 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah	Sangat	Sangat	100
(IID)	Inovatif	Inovatif	

Sumber data: Dokumen RPJMD 2021-2025

Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD





Sumber data : Penilaian IID

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 sudah sesuai dengan target akhir RPJMD, akan tetapi masih perlu adanya optimalisasi pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2024, antara lain:

- 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi;
- Mengoptimalkan Partipasi PD
   Perbup 31/2023 mengamanatkan bahwa 1 PD 1 inovasi tiap tahun;
- 3. Meningkatkan Partisipasi Inovator
  - Mengintegrasikan dan mengkolaborasi inovasi yang berkaitan dalam menunjang sasaran strategis daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan inovasi daerah

- Mereplikasi inovasi yang ada di perangkat daerah untuk berbagi pakai dengan perangkat daerah lainnya. Contoh: Inovasi Kopi Pahit direplikasi oleh seluruh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menjaga Keberlanjutan Inovasi
- 4. Meningkatkan Partisipasi Inovator
- 5. Dilakukan kompetisi inovasi daerah setiap tahun
- 6. Menguatkan kelembagaan yang menangani inovasi yang semula ditangani oleh fungsional ahli muda diusulkan dalam bentuk bidang yang tergabung dalam bappeda dengan mengkolaborasikan menjadi BAPERIDA kabupaten sidoarjo sebagaimana persetujuan dari BRIN dengan Tindak Lanjut Proses RAPERBUP kelembagaan di bagian hukum.

#### A.1.7 Indikator Kinerja VII: Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control.

Tabel 3.19 Realisasi SPIP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdifinisi	Level 3 Terdifinisi	100

Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2023

Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP dengan nilai **3,15** yang berarti bahwa capaian telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan

organisasi, namun belum pada sasaran strategis PD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan.

Dapat dilihat dari capaian SPIP sejak tahun 2021 – 2023 bahwa SPIP Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Level 3 (terdifinisi)

Tabel 3.20 Nilai SPIP 2021 - 2023

Tahun	Opini atas Audit BPK
2021	Level 3 (terdifinisi)
2022	Level 3 (terdifinisi)
2023	Level 3 (terdifinisi)

Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2021-2023

Begitu juga dengan ketercapaiannya dengan Target Akhir RPJMD yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdifinisi	Level 3 Terdifinisi	100

Sumber data : Dokumen RPJMD 2021 - 2025

Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2023

Jika melihat dari capaian SPIP Tahun 2023 dan perbandingan dengan Target akhir RPJMD yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan bahwa capaian SPIP Kabupaten Sidoarjo **Berhasil.** Untuk mencapai level 4 dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), organisasi perlu melakukan upaya yang lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini termasuk:

- 1. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPIP yang telah ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area peningkatan. Kemudian, terapkan perbaikan yang diperlukan dan pastikan ada mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas perbaikan tersebut secara berkala.
- 2. Penguatan Manajemen Risiko: Memperkuat manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara proaktif. Ini termasuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan manajemen risiko, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini.
- 3. Penggunaan Teknologi Informasi: Mengintegrasikan teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan SPIP. Sistem informasi manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan terintegrasi, dan sistem otomatisasi proses bisnis lainnya dapat membantu memperkuat SPIP.
- 4. Peningkatan Kepatuhan: Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Ini mencakup memperkuat pemahaman staf tentang tanggung jawab mereka, memberikan pelatihan secara teratur, dan memastikan kepatuhan secara konsisten dievaluasi dan dipantau.
- 5. Peningkatan Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder: Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan terkait SPIP, termasuk manajemen senior, staf, dan auditor. Ini dapat mencakup penyelenggaraan pertemuan rutin, pelatihan, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.



6. Pengembangan Budaya Etika dan Integritas: Mendorong budaya organisasi yang didasarkan pada etika dan integritas yang tinggi. Ini termasuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya kepatuhan, menghargai perilaku yang etis, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

## A.2 Sasaran II: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

Tabel 3. 22 Indikator Kinerja Sasaran II

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A-	A-	100	KEMENPA N RB

Sumber Data : Hasil Penilaian IPP Kementrian PAN&RB

#### A.2.1 Indikator Kinerja I: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

dengan pendampingan intensif terhadap lokus yang ditunjuk oleh Kemenpan selaku role model untuk pemenuhan PEKPP Nasional. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 mendapatkan nilai 4,43 atau kategori A- (Sangat Baik).

Kabupaten Sidoarjo juga melakukan PEKPP Mandiri pada instansional dengan memperdomani Permenpan RB nomor 29 tahun 2022 tentang PEKPP dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPP. PEKPP mandiri dilakukan terhadap 110 UPP yang dinilai pada komitmen tata kelola, pesentasi dan wawancara Kepala UPP, Survey kualitas pelayanan pada UPP. Untuk mempersiapkan lokus yang sewaktu – waktu ditunjuk kemenpan untuk dievaluasi nasional.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 21 Desember 2023 Nomor : 188/639/438.1.1.3/2023, berikut rekap hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

Tabel 3. 23 Rekap Hasil Penilaian Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Unit Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah	Katagori	Keterangan
1.	Role Model	3	A	Pelayanan Prima
		13	A-	Sangat Baik
2.	Perangkat Derah (Dinas)	1	В	Baik
۷.	Terangkat Deran (Dinas)	5	B-	Baik (Dengan Catatan)
	Perangkat Daerah	6	A-	Sangat Baik
3.	Penunjang (Badan,	2	В	Baik
٥.	Sekretariat dan	1	B-	Baik (Dengan
	Inspektorat)	8	Δ	Catatan)
	Kecamatan	6	A- B	Sangat Baik Baik
4.		4	В-	Baik (Dengan Catatan)
		1	A	Pelayanan Prima
		20	A-	Sangat Baik
5.	Puskesmas	7	В	Baik
		2	B-	Baik (Dengan Catatan)
		2	A-	Sangat Baik
		3	В	Baik
6.	Kelurahan	16	B-	Baik (Dengan Catatan)
		7	С	Cukup
		1	-	Pembinaan
7	DIMD	1	В	Baik
7.	BUMD	2	-	Pembinaan

Sumber Data : SK Bupati tentang Penilaian IPP PD Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 mendapatkan nilai **4,43** atau kategori **A- (Sangat Baik).** Penjabaran terkait realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.24 Realisasi IPP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-	A-(Sangat Baik)	100

Sumber data : Laporan Hasil IPP KemenPAN&RB 2023

Jika dilihat dari tabel capaian diatas maka IPP Tahun 2023 sudah **Tercapai**, jika melihat perolehan IPP sejak tahun 2019 mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Indeks Pelayanan Publik

4,6

4,4

4,2

4

3,8

2019 2020 2021 2022 2023

Nilai IPP 4,16 4,27 4,3 4,52 4,43

Gambar 3.13 Grafik Tren IPP Tahun 2019-2023

Sumber data : Laporan Hasil IPP oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Jika dilihat dari tren capaian IPP dari 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, bisa disimpulkan bahwa IPP Tahun 2025 dapat melampaui target akhir RPJMD, berikut penjabaran perbandingan realisasi 2023 dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.25 Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-	A-	100

Sumber data : Laporan Hasil IPP KemenPAN&RB 2023

Berikut upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) :

- Memberikan pelatihan kepada staf pelayanan publik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen waktu, dan penanganan konflik. Pendidikan terkait prinsip-prinsip pelayanan pelanggan juga perlu diperkuat.
- 2. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan menyediakan informasi yang jelas tentang proses, standar pelayanan, dan hak-hak pelanggan. Selain itu, penting juga untuk



- memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk menjamin pelayanan yang berkualitas.
- 3. Mendorong budaya pelayanan yang proaktif dan responsif di kalangan staf pelayanan publik. Ini melibatkan pemberian penghargaan atas pelayanan yang baik, serta pembinaan sikap empati dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.



#### 3. 1 Analisa Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Misi II

## 3.1.1.1 Tujuan II: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut adalah rincian ketercapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.26 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Tujuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi	2,89	6,16	213,15

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,89, dan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 6,16. Apabila dibandingkan dengan target 2,89 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sudah jauh melebihi target

yang ditentukan. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 7,53 maka mengalami penurunan **1,37** poin atau sekitar **18,19%.** Berikut grafik perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo:

Tren Pertumbuhan Ekonomi

5

0

-5

2019

2020

2021

2022

2023

Nilai Indeks

5,99

-3,69

4,21

7,53

6,16

Gambar 3.14 Grafik Tren Pertumbuhan Ekonomi 2019-2023

Sumber data: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

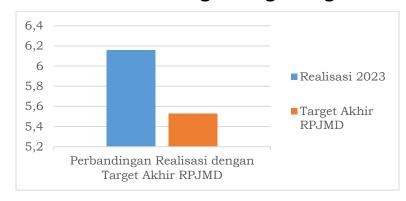
Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 5,53 di tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2023 sudah melebih target akhir RPJMD, sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.27 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi	6,16	5,53	113

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Gambar 3.15 Grafik Perbandingan dengan target Akhir RPJMD



Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Demikian halnya apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen serta provinsi Jawa Timur sebesar 4,95 persen, Kabupaten Sidoarjo lebih unggul. Berikut Grafik perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan Nasional, sebagai berikut:

7
6
5
4
3
2
Jawa Timur
Nasional

Perbandingan dengan pertumbuhan
ekonomi nasional

Gambar 3.16 Grafik Perbandingan dengan Nasional

Sumber data: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Melihat grafik tingginya pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa upaya yang mendukung antara lain :

- 1. Adanya beberapa program penunjang pengentasan kemiskinan yaitu:
- a. pemberian KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri);
- b. Renovasi Warung Rakyat;
- c. Fasilitasi UMKM Naik Kelas
- 2. **Investasi dalam Infrastruktur**: Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Investasi ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan teknologi informasi yang memadai.
- 3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**: Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan daya saing suatu negara. Program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
- 4. **Promosi Investasi dan Perdagangan**: Mendorong investasi asing dan domestik serta memperluas akses pasar internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini termasuk menyederhanakan regulasi

investasi, menawarkan insentif fiskal, dan memperkuat ikatan perdagangan regional dan internasional.

#### 2. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36. Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 tercapai 0,359 dari target 0,347 sehingga masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Berikut adalah rincian Capaian Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 berdasarkan data Sidoarjo Dalam Angka 2024:

Tabel 3.28 Realisasi Indeks Gini Tahun 2023

Indikator Tujuan	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi	0,35	0,36	96,25

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,373, maka capaian Indeks Gini tahun 2023 menurun sebesar **0,32.** Untuk detail perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo sejak tahu 2020 – 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.17 Grafik Tren Indeks Gini 2019-2023



Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional yang tercatat per Maret 2023 sebesar 0,409, Gini Ratio Kabupaten Sidoarjo masih termasuk lebih rendah dibandingkan Nasional. Berikut Grafik perbandingan antar capaian Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, Target Akhir RPJMD dan capaian Nasional. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.18 Grafik Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD dan
Nasional



Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Melihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa indeks gini Kabupaten Sidoarjo sangat jauh dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional. Dengan ini Kabupaten melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Gini yaitu:

1. **Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Keterampilan**: Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan jangka panjang.



Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat meningkatkan mobilitas sosial dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi golongan masyarakat yang kurang mampu.

2. Perlindungan Tenaga Kerja dan Upah Minimum yang Layak: Menerapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja yang kuat dan menetapkan upah minimum yang layak dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. Ini juga dapat membantu mengurangi eksploitasi pekerja dan memperkuat keamanan ekonomi bagi mereka yang rentan.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan keempat tersebut yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan telah didukung oleh 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut:

- 1. Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan;
- 2. Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa

# 3.1.1.1 Tujuan II: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.

#### Sasaran III

#### 1. 1 Indikator 9 : Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor perdagangan merupakan bagian penting dalam ekonomi suatu wilayah. Sektor perdagangan melibatkan kegiatan jual beli barang dan jasa antara produsen, pedagang, dan konsumen, serta termasuk aktivitas logistik dan distribusi.

Berdasarkan data dari BPS Tahun 2023, PDRB sector perdagangan di Kabupaten Sidoarjo tidak mencapai target yang telah disepakati pada RPJMD. Penjabaran data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.30 Realisasi PDRB Sektor Perdagangan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Kontribusi	16.00	16.00	99,14
PDRB Sektor	16,08	16,22	99,14
Perdagangan			

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

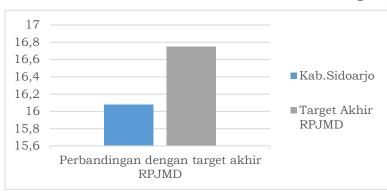
Jika dilihat dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB Sektor Perdagangan belum mencapai Target Akhir RPJMD, berikut adalah penjabaran terkait perbandingan dengan Target Akhir RPJMD:

Tabel 3.31 Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Kontribusi PDRB Sektor	16,08	16,75	96
Perdagangan			

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2025

Gambar 3.19 Grafik PDRB Sektor Perdagangan



Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Jika melihat grafik diatas maka PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo masih perlu 4% lagi dalam mencapai target akhir RPJMD. Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan presentase kontribusi PDRB sector perdagangan tersebut adalah :

1. **Pengembangan Infrastruktur**: Investasi dalam infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan, bandara, jaringan transportasi darat, dan fasilitas logistik

dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik akan membantu mengurangi biaya logistik dan waktu pengiriman, mendorong pertumbuhan perdagangan, dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

- 2. **Peningkatan Aksesibilitas**: Memperluas aksesibilitas pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta pedagang lokal dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan perdagangan.
- 3. **Promosi Ekspor dan Diversifikasi Produk**: Mendorong ekspor barang dan jasa lokal serta diversifikasi produk dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pemerintah dapat memberikan insentif, fasilitas, dan dukungan bagi produsen lokal untuk memasuki pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk mereka.
- 4. Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Kawasan Perdagangan: Membangun pusat perbelanjaan modern dan kawasan perdagangan yang menarik dapat meningkatkan aktivitas perdagangan serta daya tarik wisata dan investasi.
- 5. **Peningkatan Kualitas Layanan dan Pengalaman Konsumen**: Memperbaiki kualitas layanan dan pengalaman konsumen di sektor perdagangan dapat meningkatkan daya tarik pasar dan loyalitas pelanggan.

Selain upaya – upaya yang dilakukan diatas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyusun kinerja yang dapat mendukung peningkatan Presentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, antara lain :

#### 1. Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekspor non migas sebesar 2.84%, apabila dibandingkan dengan target 2.8%, maka tercapai 101%.

#### 2. Peningkatan UTTP yang di Tera / Tera Ulang

Persentase peningkatan UTTP yang di tera/tera ulang Tahun 2023 sebesar 0.51% Dapat diketahui bahwa realisasi UTTP Tera/ Tera Ulang Tahun 2023 sebesar 12.490 UTTP atau meningkat sebesar 0,51% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 12.427 UTTP.



#### 3. Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pasar

Pada Tahun 2023, hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar mendapatkan hasil 97,6 (sangat baik). Hal ini mengalami peningkatan dari hasil SKM Pelayanan Pasar Tahun 2022 dengan hasil 95,86 (Sangat Baik). Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan pasar merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pasar dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan baik dari pengelola pasar maupun pedagang pasar.

#### Sasaran III

#### 1.2 Indikator 10 : Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah, serta dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan data dari BPS Sidoarjo bahwa Tahun 2023 Persentase kontribusi PDRB sektor industri adalah 52,81 dari target 52,11 maka capaiannya adalah 94,89%, sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan. Berikut penjabaran capaian PDRB Sektor Industri:

Tabel 3.32 Realisasi PDRB Sektor Industri

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	50,11	52,81	94,89

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Begitu juga dengan Realisasi PDRB Sektor Industri belum tercapai jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD. Berikut adalah grafik perbandingannya ;

55 54,21
54
53
52
51 50,11
50
49
48

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

• Kab.Sidoarjo • Target Akhir RPJMD

Gambar 3.20 Grafik PDRB Sektor Industri

Sumber data: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Jika melihat grafik diatas maka PDRB Sektor Industri di Kabupaten Sidoarjo masih perlu 8% lagi dalam mencapai target akhir RPJMD. Adapun kinerja yang dilakukan dalam meningkatkan presentase kontribusi PDRB sektor industri tersebut adalah :

# 1. Meningkatkan Presentase Pertumbuhan Usaha Sendiri:

Capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Industri pada tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 1.75% atau sebanyak 160 IKM dari target 0.93% atau sebanyak 160 IKM. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 159%. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan IKM dan memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha industri melalui pemberian rekomendasi verifikasi teknis serta fasilitasi standarisasi bagi IKM.

#### 2. IKM Naik Kelas:

IKM naik kelas adalah upaya yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendorong dan meningkatkan IKM agar mampu meningkatkan penjualan dan atau modal menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada tahun 2023, IKM Naik kelas sebanyak 401 IKM, apabila dibandingkan dengan target 400 IKM, maka tercapai 100.3%. Jika dibandingkan dengan

target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 700 IKM, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 401 IKM dengan persentase capaian sebesar 57,29%.

#### Sasaran III

# 1.3 Indikator 11 : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas

Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian dalam arti luas mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari seluruh aktivitas yang terkait dengan sektor pertanian, termasuk produksi tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pertumbuhan PDRB ini diukur dengan perubahan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data dari BPS Sidoarjo bahwa Tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas adalah 1,67 dari target 2,82 maka capaiannya adalah 58,19%, sehingga masih belum mencapai target yang ditentukan.

Tabel 3.33 Realisasi PDRB Sektor Pertanian

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan PDRB		0.07	<b>5</b> 0.10
Sektor Pertanian dalam	1,67	2,87	58,19
arti luas.			

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian juga belum tercapai. Berikut penjabaran capaiannya:



Tabel 3.34 Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan PDRB	4 6 -	2.05	F1 00
Sektor Pertanian dalam	1,67	3,25	51,38
arti luas.			

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas, antara lain :

# 1. Meningkatkan Produktivitas pertanian

Perkembangan produktivitas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan pada beberapa komoditi baik tanaman pangan dan hortikultura. Pada komoditas padi terjadi peningkatan sebesar 0,0276% atau sebesar 0,019 kw/ha dibanding tahun 2022.

# 2. Meningkatkan Produktivitas peternakan

Pada tahun 2023 Produksi Peternakan (Daging, Susu, dan Telur) sebanyak 37.986.288 kg dari target 36.333.000 kg, sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Kasus penyakit PMK Dan LSD pada ternak di Kabupaten Sidoarjo sudah zero case tapi berdasarkan surveillance penyakit PMK oleh BBPusvetma masih ada ternak yang seropositif NSP PMK, artinya masih ada ternak yg memiliki antibodi terhadap infeksi alam PMK sehingga kemungkinan penularan penyakit PMK kembali jika antibodi PMK rendah.

# 3. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 82.209.600 kilogram dari target 79.086.882 kilogram atau tercapai 3,9 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 81.767.100 kilogram maka terdapat peningkatan 442.500 kilogram.

# 4. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 25.905.000 kilogram dari target 25.806.058 kilogram atau



tercapai 3,55 %. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 25.016.620 kilogram maka terdapat peningkatan 888.380 Kilogram.

# 5. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Laut

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15.947.800 kilogram dari target 15.875.000 kilogram atau tercapai 100,46%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 15.859.100 kilogram maka terdapat peningkatan 88.700 kilogram atau sekitar 0,56%.

# 6. Meningkatkan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan

Pada tahun 2023 hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 562.800 kilogram dari target 562.000 kilogram atau tercapai 100,14%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 562.700 kilogram maka terdapat peningkatan 100 kilogram atau sekitar 0,02%.

#### Sasaran III

#### 1.4 Indikator 12: Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berikut adalah penjabaran terkait Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi:

Tabel 3.35 Realisasi Nilai Investasi

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi.	-2,87	1,25	44,00

Sumber data: BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Pada tahun 2023 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.13.681.823.120.000,00 dari target Rp.7.396.748.810.000,00 maka tercapai 184,97%. Namun Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu senilai Rp.14.086.231.612.109,50 maka terdapat penurunan senilai Rp.404.408.492.109,50 atau sekitar -(2,87%). Jika dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 1,52 maka Nilai Investasi masih belum tercapai.

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi.	-2,87	1,54	41,37

Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, Nilai Investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 menurun drastis sebesar 47,09%. Berikut adalah grafik tren nilai Investasi dari tahun 2020 – 2023.

Gambar 3.21 Grafik Tren nilai Investasi 2020-2023



Sumber data: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Penurunan nilai investasi Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena kurang tertibnya perusahaan yang memiliki investasi dalam melaporkan nilai investasinya kepada PD terkait, sehingga akan lambat pula dalam penyampaian laporan ke BKPM / Pusat. Upaya yang dilakukan agar nilai investasi semakin meningkat, yaitu antara lain :

- 1. Letak geografis kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis;
- 2. Infrastruktur seperti bandara, jalan tol, pusat perindustrian dan pergudangan;
- 3. Regulasi yang mendukung dimulai dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, sampai dengan turunannya serta inovasi dalam menerapkan aturan-aturan tersebut;
- 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung investasi seperti Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup Pemberian Insentif;
- 5. Adanya inovasi daerah yang mendukung aplikasi OSS RBA yang berlaku nasional;
- 6. DPMPTSP berinovasi dengan memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaan-perusahaan yang dipilih dan diprioritaskan;
- 7. Kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian;

# 3.1.1.1 Tujuan II: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.

#### Sasaran IV

#### 1. 5 Indikator 13: Persentase Usaha Mikro

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.637 usaha mikro setara dengan 2,06% dari total keseluruhan 176.425 usaha mikro sehingga sudah tercapai dari target 1,98%. Berikut adalah penjabaran realisasi Presentase Usaha Mikro

Tabel 3.37 Realisasi Usaha Mikro

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Presentase Usaha Mikro	2,06	1,98	104,04

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perbandingan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 1,93% atau sebanyak 3.399 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 238 usaha mikro. Meskipun target tahun 2023 sudah tercapai, namun keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antara usaha mikro yang dengan fasilitas peningkatan usaha mikro tidak seimbang. Sedangkan untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD dijabarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Presentase Usaha Mikro	2,06	2,15	95,81

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.22 Grafik Tren Usaha Mikro Mandiri



Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Melihat dari tren grafik diatas disimpulkan bahwa Presentase Usaha Mikro meningkat tiap tahun. Akan tetapi masih perlu adanya upaya dalam meningkatkan optimalisasi pelayanan dan pendampingan usaha mikro salah satuny ialah:

- 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.
- 2. Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- 3. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
- 4. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- 5. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

#### Sasaran IV

# 1. 6 Indikator 14 : Persentase Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 367 koperasi setara dengan 24,96% dari total keseluruhan 1.470 koperasi sehingga sudah tercapai dari target 24,69%. Berikut adalah tabel capaian Koperasi Berkualitas Tahun 2023:



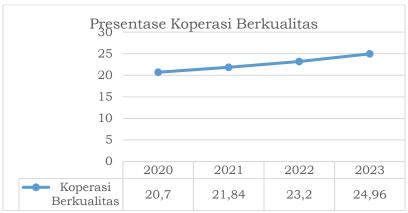
Tabel 3.39 Realisasi Koperasi Berkualitas

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Koperasi Berkualitas	24,96	24,69	101,09

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perbandingan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 23,20% atau sebanyak 343 koperasi sehingga terdapat peningkatan sebanyak 24 koperasi. Untuk tahun 2024 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi. Adapun perkembangan jumlah koperasi yang berkualitas dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.23 Grafik Tren Koperasi Berkualitas



Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sedangkan jika dibandingkan dengan target Akhir RPJMD, realisasi koperasi berkualitas pada tahun 2023 capainnya hanya 82,27% masih belum tercapai. Berikut penjabaran terkait perbandigan realisasi 2023 dengan target Akhir RPJMD:

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Koperasi Berkualitas	24,96	30,34	82,27

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Meskipun target tahun 2023 sudah tercapai, namun untuk melampaui target akhir RPJMD maka perlu mengembangkan keterbatasan kapasitas SDM pengelola koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut ke depan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan peningkatan usaha koperasi. Berikut adalah upaya yang dilakukan agar koperasi masuk ke dalam kategori berkualitas:

- 1. Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- 2. Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian
- 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi
- 4. Memberikan fasilitas pemasaran produk koperasi
- 5. Menyediakan klinik konsultasi koperasi
- 6. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi

#### Sasaran IV

#### 1. 7 Indikator 15: Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri berfokus pada pembangunan dan pengembangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa. Konsep ini sering kali digunakan dalam konteks pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang, di mana desa-desa sering menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan.

Pendekatan Desa Mandiri melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai program pembangunan. Prinsip utama dari konsep Desa Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya lokal mereka sendiri, meningkatkan produktivitas pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya, serta memperkuat jaringan sosial dan budaya di dalam komunitas. Berikut adalah tabel capaian Presentase Desa Mandiri Tahun 2023:



Tabel 3.41 Realisasi Desa Mandiri

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Desa Mandiri	47,80	13,98	341,92

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun perkembangan Presentase Desa Mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.24 Grafik Tren Desa Mandiri



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sedangkan perbandingan dengan target akhir RPJMD, presentase Desa Mandiri sudah sangat Berhasil, yaitu dengan capaian sebesar 256,57%. Berikut adalah tabel perbandingan dengan target Akhir RPJMD:

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Desa Mandiri	47,80	18,63	256,67

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meskipun realisasi 2023 telat melampaui target akhir RPJMD, tetapi masih perlu adanya upaya untuk meningkatkan capaian desa mandiri agar Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Sidoarjo semakin banyak, berikut beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Desa Mandiri:



# 1. Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan usaha lokal.

# 2. Akses Terhadap Sumber Daya

Memastikan bahwa desa memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya seperti tanah, air, dan energi. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung redistribusi tanah kepada petani kecil, pengembangan infrastruktur irigasi, dan promosi energi terbarukan di tingkat desa.

# 3. Pengembangan Infrastruktur

Meningkatkan akses desa terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal.

# 4. Pengembangan Pasar Lokal

Membantu desa dalam mengembangkan pasar lokal untuk mempromosikan produk-produk lokal dan meningkatkan akses pasar bagi petani dan produsen lokal. Dukungan teknis dalam hal pemasaran dan manajemen juga dapat membantu desa dalam memperluas jangkauan pasar mereka.

# 5. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa

Memastikan bahwa pemerintah desa memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk pelatihan bagi pejabat desa dalam perencanaan, manajemen keuangan, dan pengawasan program-program pembangunan.



# 3. 1 Analisa Capaian Kinerja

# 3.1.1 Misi II

# 3.1.1.2 Tujuan III: Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena memberikan solusi jangka panjang dengan memberdayakan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

# 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakeriaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 8,05 persen, turun 0,75 poin. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berkurang 165,59 ribu orang menjadi sebanyak 1.176,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,62 persen, turun 3,25 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berkurang 165,59 ribu orang menjadi sebanyak 1.176,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,62 persen, turun 3,25 persen poin

dibandingkan TPAK Agustus 2022. Berikut adalah penjabaran realisasi capaian tahun 2023 :

Tabel 3.43 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Pegangguran Terbuka	8,05	10,09	126,51

Sumber data : Bappeda Sidoarjo

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami penurunan dan tahun 2023 mencapai 8,05%. walaupun pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, TPT Kabupaten Sidoarjo mengalami titik tertinggi diatas Jawa Timur bahkan Nasional yaitu mencapai 10,97%. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka:

Gambar 3.25 Grafik Tren Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber data : Bappeda Sidoarjo

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 9,14%, maka realisasi tahun 2023 sudah melampui target akhir RPJMD. Demikian hal nya apabila dibandingkan dengan realisasi Nasional pada tahun 2023 sebesar 5,32% dan Jawa Timur sebesar 4,88%, maka Kabupaten Sidoarjo masih dalam posisi diatas Jawa Timur dan Nasional. Berikut tabel Perbandingan relaisasi TPT 2023 dengan target akhir RPJMD dan dengan realisasi TPT Nasional:

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi 2023, Target Akhir RPJMD, Realisasi Nasional

Indikator Tujuan	Realisasi	Realisasi	Target Akhir
	2023	Nasional	RPJMD
Pegangguran Terbuka	8,05	5,32	9,14

Sumber data : Bappeda Sidoarjo

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menekan TPT agar bisa lebih rendah dibawa Jawa Timur maupun Nasional adalah sebagai berikut :

- Menciptakan lapangan kerja baru, dengan program prioritas Bupati 100.000 lapangan kerja baru. Untuk tahun 2023 telah terealisasi 41.649 lapangan kerja;
- 2. Memfasilitasi masyarakat pencari kerja dengan mengadakan Job Fair oleh Dinas Tenaga Kerja;
- 3. Penguatan hubungan industrial, dengan fasilitasi mediasi antara pekerja dan perusahaan agar terjadi harmonisasi yang diharapkan dapat menekan angka pemutusan kerja atau PHK.

# 2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,00 persen turun dari

tahun 2022 yang masih berada pada angka 5,36%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,40% maka capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran realisasi capaian tahun 2023 :

Tabel 3.45 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Penduduk Miskin	5,00	5,40	107,41

Sumber data : Bappeda Sidoarjo

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 5%, maka Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sudah memenuhi target akhir RPJMD. Berikut tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023.

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

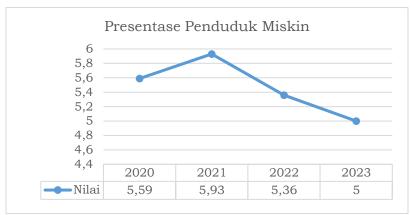
Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Penduduk Miskin	5,00	5,00	120,41

Sumber data : Bappeda Sidoarjo

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 571.696 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 523.213,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,72 mengalami penurunan sebesar - 0.12 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,84. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,16, mengalami penurunan sebesar -0,02 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,18. Perkembangan

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :

Gambar 3.26 Grafik Tren Penduduk Miskin



Sumber data : BPS Sidoarjo

Penanggulangan kemiskinan adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan terpadu dari berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan:

# 1. Pendidikan yang Berkualitas

Memberikan akses yang lebih luas dan berkualitas terhadap pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan yang baik membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan individu untuk keluar dari kemiskinan.

# 2. Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas

Melakukan pelatihan keterampilan bagi individu yang kurang terampil atau terpinggirkan dari pasar tenaga kerja. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan penghasilan.

# 3. Pemberdayaan Ekonomi

Mendorong kewirausahaan, pembentukan koperasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di komunitas miskin. Ini dapat memberikan sumber penghasilan tambahan bagi individu dan keluarga mereka.

# 4. Perlindungan Sosial

Menerapkan program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, tunjangan pengangguran, dan program bantuan pangan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

# 5. Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Ini termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, program imunisasi, dan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau.

# 6. Pengembangan Infrastruktur

Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan listrik. Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### Sasaran VI

# 1.8 Indikator 16: Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sector

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di tahun 2023 tercapai 91,95% dari target 89,91% maka capaian sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 89,61% maka terdapat peningkatan angka 2,34 atau sekitar 2,61%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 90,86%, maka capaian 2023 sudah melampui target akhir RPJMD. Berikut adalah penjabaran terkait capaian Realisasi Tahun 2023.

Tabel 3.47 Realisasi Tenaga Kerja yang Terserap dan disembilan sektor

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	91,95	89,91	102,27

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab.Sidoarjo

Sedangkan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 90,86%, maka capaian 2023 sudah melampui target akhir RPJMD.



Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Ahir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	91,95	90,86	100,60

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab.Sidoarjo

Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.27 Grafik Tren Tenaga Kerja yang terserap di 9 sektor



Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab.Sidoarjo

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor yaitu :

- 1. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
- 2. Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
- 3. Link and match kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.
- 4. Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

#### Sasaran VI

2023:

# 1. 8 Indikator 17: Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Jumlah indeks (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.571.696 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp.523.213,00. Berikut adalah penjabaran realisasi

Tabel 3.49 Realisasi Garis Kemiskinan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	95,00	94,60	100,42

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.571.696 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp.523.213,00. Begitu juga dengan perbandingan dengan target akhir RPJMD, sehingga capaian Garis Kemiskinan 100%. Berikut penjabaran perbandingan realisasi 2023 dengan Target akhir RPJMD:



Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	95,00	95,00	100

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebanyak 95,00% dari jumlah penduduk dengan target 94,60% sehingga sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 94,64% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin meningkat. Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.28 Grafik Penduduk Diatas Garis Kemiskinan



Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka

Menaikkan garis kemiskinan melibatkan berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga fokusnya adalah mengangkat individu atau keluarga di bawah garis kemiskinan agar mereka dapat hidup di atas garis tersebut. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:



# 1. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan

Memberikan akses yang lebih luas dan berkualitas terhadap pendidikan formal dan non-formal.

# 2. Pemberdayaan Ekonomi

Mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di kalangan masyarakat miskin.

# 3. Peningkatan Akses Terhadap Pekerjaan

Mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan memastikan akses yang adil terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

# 4. Perlindungan Sosial

Menerapkan program-program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, tunjangan pengangguran, dan program bantuan pangan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga mereka.

# 5. Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

# 6. Peningkatan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar

Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan energi listrik.

# 3. 1 Analisa Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Misi III

# 3.1.1.1 Tujuan IV: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

# 1. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 0,843 dari target 0,772 sehingga mencapai target dengan capaian 109,20%. Berikut adalah tabel penjabaran realisasi 2023:

Tabel 3.51 Realisasi Garis Kemiskinan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	0,843	0,772	109,20

Sumber data : Laporan hasil pengukuran indeks infrastruktur

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,796 dan realisasi Indeks Infrastruktur tahun 2023 sebesar 0,843, maka Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sudah melampui target akhir RPJMD sebesar 0,047 poin.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur	0,843	0,796	109,97

Sumber data: Laporan hasil pengukuran indeks infrastruktur

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,792, maka terdapat kenaikan yang cukup tajam sebesar 0,051 atau 6,44%. Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 3.29 Grafik Perkembangan Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo



Sumber data: Laporan hasil pengukuran indeks infrastruktur

Pada tahun 2023 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road, Peningkatan / Betonisasi Jalan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi Taman, Pembangunan Trotoar Jalan Raya, Rehabilitasi Puskesmas, Peningkatan Afvoer, dan lain sebagainya. Walaupun capaian infrastruktur sudah 100% dan tiap tahun telah mengalami peningkatan akan tetapi tetap perlu adanya upaya dalam meningkatkan Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan infrastruktur merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur:

# 1. Investasi yang Berkelanjutan

Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi secara berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur.

# 2. Perencanaan yang Terarah

Perencanaan infrastruktur harus didasarkan pada analisis yang komprehensif tentang kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan potensi pembangunan.

# 3. Teknologi dan Inovasi

Penerapan teknologi baru dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan ketahanan infrastruktur.

# 4. Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Fokus pada pengembangan infrastruktur di pedesaan juga penting untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan.

# 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Berikut adalah tabel penjabaran realisasi IKLH 2023:

Tabel 3.52 Realisasi Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,99	59,81	98,63

Sumber data: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 58,99 dari target 59,81 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 59,84 maka tercapai 98,58%.

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,99	59,84	98,67



Sumber data: Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Namun apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 57,54 maka terdapat peningkatan 1,45 poin atau sekitar 2,52%. Adapun perkembangan nilai / skor IKLH setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

IKLH 0,86 0.84 0,8 0,78 0,76 0,72 0,7 0,68 2020 2021 2022 2023 **→**Nilai 0,747 0,793 0,792 0,843

Gambar 3.30 Grafik IKLH

Sumber data : Laporan hasil pengukuran IKLH

Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang mencapai angka 24,42 sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih berada pada angka yang cukup aman. Hal ini dikarenakan definisi operasional dari Indeks Kualitas Lahan yang harus menunjukkan penghijauan dari tajuk ke tajuk, sedangkan sebagian besar taman di Kabupaten Sidoarjo, pepohonan belum mencapai ketinggian yang sampai menutupi dari tajuk ke tajuk.

Meningkatkan indeks lingkungan hidup melibatkan serangkaian upaya untuk melindungi, memulihkan, dan memelihara lingkungan alam serta kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks lingkungan hidup:

- Konservasi Sumber Daya Alam
   Melindungi dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati.
- Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Mengadopsi kebijakan dan teknologi yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju energi terbarukan.

- Peningkatan Kualitas Udara dan Air
   Mengurangi polusi udara dan air dengan mengendalikan emisi dari industri,
   kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia lainnya.
- 4. Pengelolaan Limbah
  Mengurangi, mendaur ulang, dan membuang limbah secara bertanggung
  jawab untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan keempat tersebut yaitu Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah didukung oleh 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut:

- 1. Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata yang terdiri dari 3 IKD ;
- 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana yang terdiri dari 4 IKD

#### Sasaran VII

# 1. 1 Indikator 18: Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dalam penilaian infrastruktur pekerjaan umum, terdiri dari beberapa aspek penilaian yaitu : Kondisi Jalan Mantap, Kecukupan Kebutuhan Ir Irigasi, Luas Banjir tertangani, Pelayanan minum air aman, akses, sanitasi layak, luas wilayah tidak kumuh, insfrastruktur perhubungan.

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum tahun 2023 yaitu 0,823 yang apabila dibandingkan dengan target 2023 adalah 0,760 maka sudah melampaui target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 0,783 maka sudah terdapat peningkatan capaian. Berikut adalah Realisasi Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2023 :

Tabel 3.54 Realisasi Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indilator Tuinor	Realisasi	Target	Capaian (%)
Indikator Tujuan	2023	2023	,



Indeks Infrastruktur Pekerjaan	0,823	0,760	108,29
Umum	- ,		·

Sumber data: Sidoarjo Dalam Angka 2024

Ada beberapa yang mendukung capaian infrstruktur pekerjaan umum melebihi 100% Aspek yang pertama adalah Kondisi Jalan Mantap.

Kondisi jalan mantap di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2023 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.022, 864 km. Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2023 adalah 97,35% dari target 95,5% sehingga sudah mencapai target dengan capaian 101,9%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 95,05% sudah terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap. Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.31 Grafik Perkembengan Jalan Mantap



Sumber data: Laporan hasil Jalan Mantap 2023

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum tahun 2023 yaitu 0,823 yang apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,823	0,777	105,92

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa indeks infrastruktur pekerjaan umum telah melampaui target akhir RPJMD, akan tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan. Salah satu upaya peningkatan indeks infrastruktur pekerjaan umum yaitu:

- 1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas;
- 2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan;
- 3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala;
- 4. Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran
- 5. pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

#### Sasaran VII

#### 1. 2 Indikator 19: Indeks Infrastruktur Pendidikan

Pada tahun 2023 Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 86,67 dengan target 86,66 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Pendidikan, yaitu Presentase Bangunan Ruang kelas Belajar dalam Kondisi Baik. Berikut adalah penjabaran realisasi Infrastruktur Pendidikan:

Tabel 3.56 Realisasi Infrastruktur Pendidikan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Pendidikan	95,60	86,60	110,39

Sumber data: Sidoarjo Dalam Angka 2024

Pada Tahun 2023 terdapat penambahan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yaitu SMP Negeri 2 Prambon, dan selain itu juga pembangunan kelanjutan dari SMP Negeri 2 Tulangan.

Jika dilihat dari capaian 2023 maka Indeks Infrstruktur Pendidikan masuk dalam katagori Sangat Baik dengan capaian diatas 100%, sedangkan jika dibandingan dengan target akhir RPJMD, Indeks Infrastruktur Pendidikan juga masuk ked dalam Kategori Sangat Baik, berikut adalah penjabaran penilaian indeks infrastruktur pendidikan.

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Pendidikan	95,60	92,71	103,12

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

Walaupun nilai capaiannya sudah melebihi 100% tetapi masih perlu dilakukan upaya agar infrastruktur pendidikan dapat ditingkat lagi,.Upaya yang dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu:

- 1. Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- 2. Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanaan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusat Berat.

- 3. Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biayai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi.
- 4. Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.

#### Sasaran VII

#### 1. 3 Indikator 20 : Indeks Infrastruktur Kesehatan

Pada tahun 2023 Indeks Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 80,91 dengan target 75,19 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Kesehatan, yaitu presentase bangunan fasilitas kesehatan. Berikut adalah penjabaran realisasi Indeks Infrastruktur Kesehatan:

Tabel 3.58 Realisasi Infrastruktur Kesehatan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Kesehatan	80,91	72,32	111,88

Sumber data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jika dilihat dari data diatas maka capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan sudah melebihi 100%, atau masuk kedalam kategori sangat berhasil. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD dengan nilai **72,59** juga masuk dalam Kategori Sangat Berhasil. Berikut adalah penjabaran terkait capaian infrastruktur kesehatan dibandingkan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.59 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Kesehatan	80,91	72,59	104,13

Sumber data: Sidoarjo Dalam Angka 2024

Walapun capaian sudah melebihi 100% tetap perlu adanya upaya dalam pembangunan fasilitas kesehatan pemerintah khusunya pada RSUD dan Puskesmas, upaya yang dilakukan yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharan rutin gedung, baik bersifat ringan, sedang maupun berat.

#### Sasaran VIII

# 1. 4 Indikator 21: Indeks Kualitas Air

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu realisasi 54,32 dengan target 51,54. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 47,75 maka tahun 2023 sudah terdapat peningkatan kualitas air. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif.

Permasalahan yang menjadi kendala peningkatan kualitas air yaitu adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai). Berikut realisasi Indeks Kualitas Air tahun 2023:

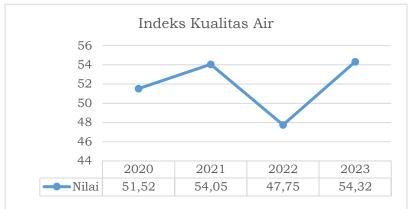
Tabel 3.60 Realisasi Indeks Kualitas Air

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Kualitas Air	54,32	51,54	105,39

Sumber data: DLHK Kab.Sidoarjo

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian 2023 naik sebanyak 6,5 poin. Berikut adalah tren grafik indeks kualitas air dari tahun 2020 – 2023:

Gambar 3.32 Grafik Indeks Kualitas Air



Sumber data: DLHK Kab. Sidoarjo

Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2023 dimaksud (54,32) masuk dalam kategori sedang (yakni dalam rentang  $50 \le x < 75$ ). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capainnya juga melebihi 100%. Berikut tabel perbandingan realisasi 2023 dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Air	54,32	51,57	105,33	

Sumber data : DLHK Kab. Sidoarjo

Walaupun capaiannya sudah melebihi 100% tetap perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas air yaitu :

- 1. Pengelolaan limbah: Mengelola limbah secara efisien dan bertanggung jawab, baik itu limbah industri maupun domestik, untuk mencegah pencemaran air;
- 2. Edukasi dan kesadaran masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air;

- 3. Pengawasan dan regulasi yang ketat: Menerapkan regulasi yang ketat dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya serta limbah industri untuk mencegah pencemaran air;
- 4. Kolaborasi lintas sektor: Melibatkan berbagai pihak, termasuk industri, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas air dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

# Sasaran VIII

#### 1. 5 Indikator 22: Indeks Kualitas Udara

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target tahun 2023 dan mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar **81,98** sedangkan target **85,16**. Berikut adalah tabel realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 :

Tabel 3.62 Realisasi Indeks Kualitas Udara

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Kualitas Udara	81,98	85,16	96,27

Sumber data : DLHK Kab.Sidoarjo

Sebenarnya untuk pemenuhan baku mutu konsentrasi S02 dan CO2 sudah memenuhi kriteria, namun secara perhitungan akumulasi belum memenuhi target. Hal ini memang disebabkan semakin banyaknya polusi akibat residu transportasi (knalpot). Bahwa pada tahun 2023 alat pengukur indikator kualitas udara dipasang di tempat – tempat yang memang padat lalu lintas, sehingga apabila kendaraan yang berada pada tempat tersebut semakin padat, maka volume polusi juga akan semakin besar.

Selain itu, rata-rata nilai parameter NO2 di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan Kawasan Permukiman mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 3.33 Grafik Indeks Kualitas Udara



Sumber data: DLHK Kab. Sidoarjo

Meskipun demikian nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 diatas (sebesar 81,98) masuk dalam kategori baik (yakni dalam rentang  $70 \le x < 90$ ). Tetapi jika realisasi 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaiannya masih dibawah 100%. Berikut adalah perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD :

Tabel 3.63 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks KualitasUdara	81,98	85,19	96,23

Sumber data: DLHK Kab. Sidoarjo

Perlu adanya upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Sidoarjo khususnya dibeberapa titik industry :

- 1. Pengendalian polusi udara: Mengurangi emisi dari sumber-sumber polusi utama seperti industri, transportasi, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah.
- 2. Promosi transportasi ramah lingkungan: Menggalakkan penggunaan transportasi umum, berbagi kendaraan, dan transportasi berbasis non-motor untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor.

3. Penghijauan perkotaan: Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau, taman kota, dan pelestarian lahan terbuka untuk menyerap polusi udara dan menyediakan sumber oksigen yang lebih baik.

#### Sasaran VIII

# 1. 6 Indikator 23 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan tidak mencapai target tahun 2023 namun terdapat kenaikan jika dibanding tahun 2022. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 sebesar 24,42 sedangkan target 27,12 sehingga tidak mencapai target. Berikut adalah penjabaran realiasai kualitas tutupan lahan 2023 :

Tabel 3.64 Realisasi Indeks Kualitas tutupan Lahan

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,42	27,12	90,04

Sumber data : DLHK Kab.Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 yaitu 23,63 maka terdapat penurunan kualitas sebanyak 0,79 poin atau sekitar 3,34%. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 3.34 Grafik Indeks Kualitas Tutupan Lahan



Sumber data: DLHK Kab. Sidoarjo

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi 2023 belum mencapai 100%. Berikut tabel perbandingannya :

Tabel 3.65 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,42	27,15	89,42

Sumber data : DLHK Kab.Sidoarjo

Proses verifikasi tutupan lahan dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan ulang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan ketidak tercapaian masih sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu kurangnya area penghijauan tajuk ke tajuk. Sebenarnya pada tahun 2023 sudah banyak dilakukan revitalisasi taman, namun pepohonan yang ditanam masih belum memenuhi ketinggian tajuk.

Solusi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan, yaitu:

- Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Sidoarjo serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
- 2. Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;

- 3. Pengendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
- 4. Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan;
- 5. Mempertahankan area hijau (green belt) yang sudah ada dan menghindari/ meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk.

#### Sasaran VIII

#### 1. 7 Indikator 24: Indeks Resiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks resiko bencana Tahun 2023 berada pada skor 98,12 dari target skor 92,53 sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Resiko Bencana belum mencapai target. Berikut adalah tabel realisasi IRB 2023 :

Tabel 3.66 Realisasi Indeks Resiko Bencana

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	98,12	92,53	93,96

Sumber data : BPBD Kab.Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu pada skor 98,74 maka capaian lebih baik karena sudah ada penurunan. Dengan realisasi Indeks resiko bencana sebesar 98,12 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG. Adapun tren Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :

Indeks Resiko Bencana 115 110 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 Nilai 112,82 99,12 98,74 98,12

Gambar 3.35 Grafik Indeks Resiko Bencana

Sumber data : BPBDKab.Sidoarjo

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga kompenen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponene kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun. Tetapi jika dibandingan dengan target Akhir RPJMD maka realisasi IRB 2023 masih dibawah 100%

Tabel 3.67 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	98,12	76,86	72,34

Sumber data: BPBD Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

- 1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / Early Warning System (EWS) bencana
- 2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan
- 3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak
- 4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana



#### 3.1.1 Misi IV

## 3.1.1.1 Tujuan V : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- 1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (a long and helaty life)
- 2. Pengetahuan (knowledge)
- 3. Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :
  - a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
  - b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
- 4. Standar Hidup Layak (decent standard of living)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai **81,88** dari target **80,91** atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2022 yaitu 81,02 maka terdapat kenaikan **0,86** poin atau sekitar 1,06%. Berikut adalah tabel realisasi IPM 2023:

Tabel 3.68 Realisasi Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	81,88	80,92	101,19

Sumber data : BPS Sidoarjo 2023

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota. IPM Nasional sebesar **74,39** sedangkan IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sebesar **81,88**. Berikut grafik perbandingannya:

Gambar 3.36 Grafik Perbandingan IPM Sidoarjo dengan IPM Nasional



Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Sidoarjo telah melampaui IPM Nasional sebesar **7,49** point. Berikut grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 3.37 Grafik Indeks Pembangunan Manusia



Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 81,62 maka realisasi IPM 2023 sudah melampui target akhir RPJMD.



Tabel 3.69 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	81,88	81,02	101,06

Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Jika dilihat dari tabel diatas, IPM Kabupaten Sidoarjo meningkat nilainya tiap tahun, dan telah melampaui target akhir RPJMD, akan tetapi tetap perlu adanya upaya dalam pelaksanaannya, yaitu:

- i. **Pendidikan yang Berkualitas**: Memberikan akses yang lebih luas dan kesempatan yang sama dalam pendidikan untuk semua orang. Ini termasuk penyediaan sekolah yang baik, guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan, serta fasilitas pembelajaran yang memadai.
- ii. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: Program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
   Hal ini dapat mencakup pelatihan teknis, keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan keterampilan interpersonal.
- iii. **Pemberdayaan Perempuan**: Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan keempat tersebut yaitu **Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya** telah didukung oleh 3 Sasaran Strategis, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- **3.** Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat

#### Sasaran IX

#### 1.1 Indikator 25: Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 tercapai 14,97 dari target 2023 15,41, sehingga realisasinya belum mencapai target. Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel realisasi HLS 2023 :

Tabel 3.70 Realisasi Harapan lama Sekolah

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Harapan lama sekolah	14,97	15,41	97,14

Sumber data: BPS Sidoarjo 2023

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 14,95 tahun maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,97 tahun ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mencapai jenjang Pendidikan Tinggi. Adapun tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3.38 Grafik Harapan Lama Sekolah



Sumber data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2023

Melihat grafik diatas, harapan lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun selalu meningkat, akan tetapi realisasinya tidak dapat melampaui target, baik target ditahun berjalan maupun target akhir RPJMD. Berikut tabel perbandingan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Harapan Lama Sekolah	14,97	14,95	99,87

Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- 1. Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- 2. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 3. Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anakanak muda Kabupaten Sidoarjo

#### Sasaran IX

#### 1.2 Indikator 26: Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2023 tercapai **10,78** dari target **11,23** sehingga belum mencapai target, Ketidak-tercapaian disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi, tidak mempertimbangkan tren angka tahun – tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel realisasi RLS Tahun 2023:

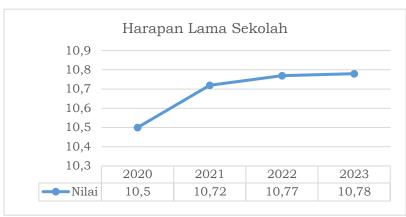
Tabel 3.72 Realisasi Rata-rata lama Sekolah

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Rata – rata lama sekolah	10,78	11,23	95,99

Sumber data: BPS Sidoarjo 2023

. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 10,77 maka RSL sudah ada peningkatan. Dengan realisasi tersebut menunjukkan bahwa ratarata penduduk Kabupaten Sidoarjo berusia 25 tahun keatas telah menempuh jenjang pendidikan SMA/SMK atau setara SMA/SMK kelas XI

Gambar 3.39 Grafik Rata-rata Lama Sekolah



Sumber data: Data Pokok Pendidikan Tahun 2023

Melihat grafik diatas, Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun selalu meningkat, akan tetapi realisasinya tidak dapat melampaui target, baik target ditahun berjalan maupun target akhir RPJMD. Berikut tabel perbandingan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah	10,78	10,77	99,91

Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- 1. Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- 2. Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 3. Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anakanak muda Kabupaten Sidoarjo.

#### Sasaran X

#### 1.3 Indikator 27: Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup Tahun 2023 tercapai **75,36** dari target **75,19** dengan capaian 100,23%. Dengan realisasi Usia Harapan Hidup 75,36 ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik. Berikut adalah tabel realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) pad atahun 2023:

Tabel 3.74 Realisasi Usia Harapan Hidup (UHH)

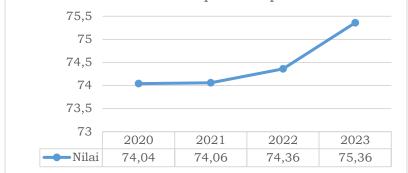
Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup (UHH)	75,36	75,19	100,23

Sumber data: BPS Sidoarjo 2023

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 74,36 maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi yaitu 1,00 poin atau sekitar 1,34%. Adapun tren capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Usia Harapan Hidup 75,5

Gambar 3.40 Grafik Usia Harapan Hidup



Sumber data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 74,36 Tahun dengan AHH Kabupaten Sidoarjo 2023 sebesar 75,36 Tahun, maka AHH Kabupaten Sidoarjo telah melampui target akhir RPJMD. Berikut adalah tabel perbandingan antara Realisasi 2023 dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Usia Harapan Hidup	75,36	74,36	101,34

Sumber data: BPS Kab. Sidoarjo

Sedangkan jika dibandingkan dengan AHH penduduk Jawa Timur 74,87 Tahun serta AHH Nasional (Penduduk Indonesia) tahun 2023 mencapai 73,93 Tahun, maka UHH Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari AHH Penduduk Jawa Timur serta rata-rata penduduk Indonesia.



Gambar 3.41 Grafik Perbandingan UHH Sidoarjo dengan UHH
Provinsi dan UHH Nasional



Sumber data: BPS

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Angka Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

#### 1. Menurunkan angka kematian ibu:

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI dapat dicegah dengan dilakukan upaya seperti berikut:

- a. Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (Ante Natal Care/ANC terpadu-10T);
- b. Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- c. Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- d. Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- e. Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);

- f. Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus emergency/ rujukan darurat persalinan;
- g. Melakukan pengkajian dan pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- h. Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- i. Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- j. Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

#### 2. Menurunkan angka kematian bayi:

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi Tahun 2023 tercapai 2,82 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,4 per 1.000 kelahiran hidup sehingga sudah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 2,41 per 1.000 kelahiran hidup maka terdapat peningkatan, namun masih memenuhi standar nasional. Upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- a. Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- c. Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;



- d. Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal;
- e. Pemberian pelayanan Ante Natal Care (ANC) terpadu (10 T);
- f. Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

#### 3. Menurunkan angka stunting balita:

Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Persentase Balita Stunting Tahun 2023 tercapai 3,1% yang mengalami stunting berdasarkan data surveilans pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 7,54% maka sudah mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 5,80% maka terdapat penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain:

- a. Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- b. Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif dating ke posyandu;
- c. Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).

#### Sasaran XI

#### 1.4 Indikator 28: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan daengan IPM laki-laki. Pada tahun 2023, sebagaimana Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelrindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 400.2.2/2407.109.1.2023 bahwa penggunaan Indeks Pembangunan Gender sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah adopsi dari GII yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah **0,301** sedangkan untuk angka Tahun 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, **masih belum release** dari BPS Provinsi Jawa Timur. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain:

- 1. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- 2. Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 3. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- 4. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi



#### 3.1.1 Misi V

# 3.1.1.1 Tujuan VI: Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat

#### 1. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Capaian Indeks Kesalehan Sosial tahun 2023 yaitu 85,00 maka tercapai 100,18% atau sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah:

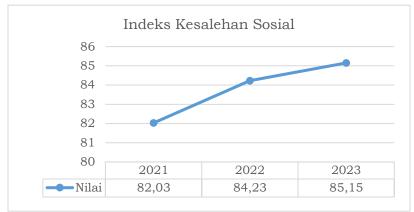
Tabel 3.76 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Kesalehan Sosial	85,15	85	100,18

Sumber data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial

Berikut perkembangan Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana grafik sebagai berikut:

Gambar 3.41 Grafik Perkembangan Indeks Kesalehan Sosial



Sumber data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut:

Tabel 3.77 Komponen Penilaian Indeks Kesalehan

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	83,29	40%	33,32
Indeks rasa Aman	81,86	30%	24,56
Indeks pelestarian Budaya	90,92	30%	27,28
		100%	85,15

Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial

Untuk mewujudkan ketercapaian tujuan ke-6, **Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat** telah didukung oleh 2 sasaran setrategis sebagai berikut:

- 1. Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat
- 2. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram

#### Sasaran XII

#### 1.1 Indikator Kinerja 29 : Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

- 1. Variable Persepsi Terhadap Toleransi
- 2. Variable Sikap Terhadap Toleransi
- 3. Variable Kerjasama Antar Suku Agama Berbeda
- 4. Variable Sikap Pemerintah Dalam Dukungan Antar Umat Beragama
- 5. Variabel Harapan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Terciptanya Toleransi Di Masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2023 tercapai 83,29 dari target 80,22 sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 81,30 maka terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 83,29 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi. Berikut adalah tabel Realisasi Indeks Toleransi tahun 2023:

Tabel 3.78 Realisasi Indeks Toleransi

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Toleransi	83,29	80,22	103,83

Sumber data: Data Bappeda Sidoarjo

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 82,14 maka realisasi Indeks toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sudah melampui target akhir RPJMD Tahun 2026. Berikut adalah tabel perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD:

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Toleransi	83,29	82,14	101,40

Sumber data : Data Bappeda Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- 1. Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
- 2. Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama.

#### Sasaran XII

#### 1.2 Indikator Kinerja 30 : Indeks Pelestarian Budaya

Indeks Pelestarian Budaya disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pelestarian Budaya merupakan komposit perhitungan dari Indeks Kesalehan Sosial yang diukur dari Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dirawat, dan sikap masyarakat terhadap kelestarian budaya dan lingkungan. Capaian Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2023 yaitu 90,92 dari target 63,58 sehingga sudah sangat jauh melampaui dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Berikut adalah tabel realisasi Indeks pelestarian Budaya Tahun 2023 :



Tabel 3.80 Realisasi Indeks Pelestarian Budaya

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Pelestarian Budaya	90,92	63,58	143

Sumber data : Data Bappeda Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 90,46 maka capaian juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD sebesar 90,46 maka Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sudah melampui target akhir RPJMD.

Tabel 3.81 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pelestarian Budaya	90,92	90,46	100,51

Sumber data : Data Bappeda Sidoarjo

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelestarian budaya Sidoarjo, antara lain :

- 1. Menggandeng para seniman dan budayawan Sidoarjo untuk berkolaborasi merawat dan melestarikan budaya Sidoarjo dengan penyelenggaraan event seni budaya bersama;
- 2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan 11 Situs Bangunan jadi Cagar Budaya;
- 3. Menyediakan Bus Wisata gratis dalam rangka fasilitasi masyarakat untuk mengunjungi obyek wisata berupa situs maupun cagar budaya;
- Melestarikan Udeng Pacul Gowang yang merupakan udeng budaya masyarakat Sidoarjo digunakan sebagai salah satu bagian kelengkapan Seragam Dinas ASN;
- 5. Memasukkan pendidikan seni budaya Sidoarjo kedalam kurikulum Pendidikan atau kegiatan pendidikan pelestarian seni budaya di Sekolah.

#### Sasaran XIII

#### 1.3 Indikator Kinerja 31 : Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamananan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks rasa aman Tahun 2023 tercapai 81,86 dari target 78,97 sehingga sudah mencapai target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 80,77 maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 81,86 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Aman Sangat Tinggi. Berikut adalah tabel realisasi Indeks Rasa Aman Tahun 2023:

Tabel 3.82 Realisasi Indeks Rasa Aman

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Rasa Aman	81,86	78,97	103,66

Sumber data : Data Bappeda Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD sebesar 80,77 maka Indeks rasa aman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 telah melampui Target Akhir RPJMD. Berikut adalah perbandingan Realisasi Indeks Rasa Aman Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD:

Tabel 3.83 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Rasa Aman	81,86	80,77	101,35

Sumber data : Data Bappeda Sidoarjo



Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.84 Komponen Penilaian Indeks Rasa Aman

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	80,43
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	84,51
Perlindungan dan Pemanfaatan atas	87,17
Kebhinekaan	
Keamanan dari Kekerasan	75,34
Indeks Rasa Aman	81,86

Sumber data : Laporan Indeks Rasa Aman

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai optimal :

- 1. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman
- 2. Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten



#### 3.1.1 Realisasi Capaian Kinerja Anggaran

#### 3.1.1.1 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dalam mengadaptasi ketentuan terkait, pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat kementrian / lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementrian negaran/ lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut di peroleh dari formula sebagai berikut :

### Tingkat efisiensi = <u>( Pagu Anggaran x Capaian kinerja ) – realisasi angaran</u> x 100 % Pagu anggaran x capaian kinerja

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Terkait pagu anggaran pada sasaran satu yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap – tiap indicator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kineja rata-rata sasaran dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathsf{CKP} = \prod_{i=1}^{m} \left( \left( \left( \prod_{m}^{n} \frac{\mathsf{Realisasi\ Indikator}_{i}}{\mathsf{Target\ Indikator}_{i}} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

#### Keterangan:

CKP: Capaian Keluaran (Output) Program

: Jumlah Keluaran (Output) Program

: Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indicator kemudian di akar pangkatkan dengan banyaknya jumlah indicator tersebut. Sehingga berdasarkan tabel diatas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah:

Tabel 3.85 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	I	NDIKATOR		KINERJA			ANGGARAN		Effisiens (%)
NO	STRATEGIS		KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
	MISI 1				nerintahan yan an Kemudahan		nsparan dan Tangkas	Melalui Digitalisasi unt	uk Meningl	katkan
	TUJUAN 1	:			la Pemerintaha kung Kemudah		h, Transparan dan Ta	ngkas Berbasis Digital s	erta Pelaya	nan Publi
	Indikator Tujuan		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (70,1)	BB) (75,38)	107,53				
1	Terselenggara nya Tata	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A (81)	BB (77,5)	95,68				
	Kelola Pemerintahan yang Bersih,	2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100				
	Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	85,63 (3,42)*)	89,76				
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90				
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik)	3,45	3,11	90,14	1.318.390.564.888	1.263.925.600.562,50	95,87	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100				
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinis	Level 3 Terdefinisi	100				

			Rata-rata ca	paian kiner 1	ja sasaran ke-	95,49	1.318.390.564.88 8	1.263.925.600.562,5 0	95,87	-0,40%
2	Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik	A- Sangat Baik	100	337.108.855.102	307.006.650.908	91,07	
	Mendukung Kemudahan Berusaha		Rata-rata ca	paian kiner 2	ja sasaran ke-	100	337.108.855.102	307.006.650.908	91,07	8,93%
	MISI 2							al Berbasis Usaha Mikro Mengurangi Kemiskina		Pertanian,
	TUJUAN 2	:					ui Percepatan Indust , Pertanian dan Perik	ri dan Perdagangan sert anan	a Mendoror	ng Potensi
	Indikator Tujuan :	1.	Pertumbuh an Ekonomi	2,89	6,16	213,15				
		2.	Indeks Gini	0,347	0,359	96,54				
3.	Berkembangny a Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdaganga n	16,22	16,08	99,14				
	Perikanan	2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	52,81	52,11	98,67	196.393.329.998	188.132.440.417	95,79	
		3.	Laju Pertumbuh an PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,82	1,67	59,22				

		4.	Persentase Pertumbuh an Nilai Investasi	1,25	-(2,87)	44,00				
			Rata-rata ca	paian kiner 3	ja sasaran ke-	71,05	196.393.329.998	188.132.440.417	95,79	-34,83%
4.	Berkembangny a Koperasi, Usaha Mikro dan	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,98	2,06	104,04				
	Kemandirian Desa	2.	Persentase Koperasi Berkualitas	24,69	24,96	101,09	55.528.291.824	52.926.237.365	95,31	
		3.	Persentase Desa Mandiri	13,98	47,80	341,92				
			Rata-rata ca	paian kiner 4	ja sasaran ke-	153,21	55.528.291.824	52.926.237.365	95,31	37,79%
	TUJUAN 3	:	Terciptanya	Lapangan K	Kerja yang berda	ımpak pada F	enanggulangan Kemi	skinan	•	
	Indikator Tujuan	1.	Tingkat Penganggu ran terbuka (TPT)	10,09	8,05	126,15				
		2.	Persentase Penduduk Miskin	5,4	5,00	107,41				
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,91	91,95	102,27	17.821.218.941	15.198.574.510	85,28	
			Rata-rata ca	paian kiner 5	ja sasaran ke-	102,27	17.821.218.941	15.198.574.510	85,28	16,61%
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis	94,60	95,00	100,42	347.971.977.806	45.750.161.761	95,37	

			Kemiskinan (GK)									
			Rata-rata ca	paian kiner 6	ja sasaran ke-	100,42	347.971.977.806	45.750.161.761	95,37	5,03%		
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan										
	TUJUAN 4	:	Meningkatny Pembanguna			g Kegiatan E	konomi Sosial yang Be	erkeadilan dan Memperl	natikan Prii	nsip		
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Infrastrukt ur	0,772	0,843	109,20						
		2. Indeks Kualita Lingku n Hidu	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup (IKLH)	59,81	58,99	98,63						
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastrukt ur Pekerjaan Umum	0,760	0,823	108,29						
		2.	Indeks Infrastrukt ur Pendidikan	86,60	95,60	110,39	2.369.926.423.378	2.112.985.477.485,24				
		3.	Indeks Infrastrukt ur Kesehatan	72,32	80,91	111,88						
			Rata-rata ca	paian kiner 7	a sasaran ke-	110,18	2.369.926.423.37 8	2.112.985.477.485,2 4	88,80	19,08%		
8.	Meningkatnya Kualitas	1.	Indeks Kualitas Air	51,54	54,32	105,39						
	Lingkungan Hidup dan Penanganan	2.	Indeks Kualitas Udara	85,16	81,98	96,27	157.012.402.956	133.289.611.250,12	84,89			

	Terhadap Bencana	3.	Indeks Kualitas Tutupan	27,12	24,42	90,04				
		4.	Lahan Indeks Resiko Bencana	92,53	98,12	93,96				
				paian kiner 8	ja sasaran ke-	96,25	157.012.402.956	133.289.611.250,12	84,89	11,80%
	MISI 4				anusia Unggul ( Dasar Lainnya	dan Berkaral	ter Melalui Peningkat	an Akses Pelayanan Bid	lang Pendid	likan,
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya	. Pendidika:	n dan Kesehata	n yang Berku	alitas dan Merata sert	a Terpenuhinya Kebutu	ıhan Dasar	Lainnya
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)	80,92	81,88	101,19				
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41	14,97	97,14			05.45	
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23	10,78	95,99	746.637.140.082	712.670.562.291	95,45	
				paian kiner 9	ja sasaran ke-	96,56	746.637.140.082	712.670.562.291	95,45	1,15%
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,19	75,36	100,23	463.812.501.297	436.062.665.346	96,33	
			Rata-rata ca	paian kiner 10	ja sasaran ke-	100,23	463.812.501.297	436.062.665.346	96,33	6,20%
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangun an Gender (IPG)	94,95	94,68*)	99,72	7.894.188.617	25.321.218.927	77,79	

			Rata-rata ca	paian kinerj 11	ja sasaran ke-	99,72	7.894.188.617	25.321.218.927	77,79	9,60%		
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.								kunan		
	TUJUAN 6	:		Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat								
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Kesalehan Sosial	85,00	85,15	100,18						
12.	Berkembangny a nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	80,22	83,29	103,83						
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	63,58	90,92	143	108.023.527.831	101.281.666.210	93,76			
			Rata-rata ca	paian kinerj 12	a sasaran ke-	121,85	108.023.527.831	101.281.666.210	93,76	23,05%		
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman,	1.	Indeks Rasa Aman	78,97	81,86	103,66	242.901919.280	227.163.501.077	93,52			
	nyaman dan tentram		Rata-rata ca	paian kinerj 13	a sasaran ke-	103,66	242.901919.280	227.163.501.077	93,52	9,78%		

Sebagaimana tabel diatas, dari 13 sasaran strategis yang sudah ditetapkan terdapat **11 sasaran** telah mengalami efisiensi anggaran, artinya sebagaian besar program/kegiatan yang sudah ditetapkan benar-benar telah mendukung dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis tersebut. Berkenaan hal tersebut, ratarata capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sebesar **103,20%**, sedangkan capaian kinerja anggrannya sebesar **92,61%**, maka dengan demikian efisiensi sumber daya anggaran Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah **10,26%**.

#### 3.1.1.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, telah didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 6.683.181.703.425** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.86 Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.428.624.553.179,00	1.364.279.158.575,00	95,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	746.634.195.082,00	712.667.617.291,00	95,45
	Program Pengelolaan Pendidikan	681.651.090.897,00	651.275.009.034,00	95,54
	Program Pengembangan Kebudayaan	38.722.200,00	38.572.250,00	99,61
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	297.600.000,00	295.015.000,00	99,13
	Program Pengendalian Perijinan	2.945.000,00	2.945.000,00	100,00
2	DINAS KESEHATAN	372.931.615.958,00	348.315.176.112,00	93,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	194.267.740.140,00	191.347.725.493,00	98,50
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	165.623.038.781,00	145.235.065.049,00	87,69
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.450.119.602,00	10.205.189.588,00	89,13
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.162.914,00	191.901.186,00	89,19
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.375.554.521,00	1.335.294.796,00	97,07
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1.364.036.063.815,00	1.215.613.746.415,00	89,12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	667.288.701.730,00	595.733.498.408,00	89,28

	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.335.552.000,00	20.805.571.150,00	97,52
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	124.737.626.551,00	117.247.204.843,00	94,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.214.412.904,00	32.767.758.785,00	88,05
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.743.877.285,00	79.800.205.434,00	96,44
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.779.336.362,00	4.679.240.624,00	97,91
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	389.763.719.451,00	331.458.951.633,00	85,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.157.327.818,00	19.144.843.657,00	90,49
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.015.509.714,00	13.976.471.881,00	93,08
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	58.215.308.394,00	53.554.533.285,00	91,99
	Program Penyelenggaraan Jalan	295.375.573.525,00	244.783.102.810,00	82,87
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	356.530.420.683,00	324.153.357.621,24	90,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.850.774.383,00	11.007.396.233,00	92,88
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	51.782.872.477,00	40.618.767.910,00	78,44
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.384.036.121,00	2.325.637.562,00	97,55
	Program Pengembangan Permukiman	27.240.249.684,00	24.199.897.360,00	88,84
	Program Penataan Bangunan Gedung	3.383.903.561,00	2.780.572.822,00	82,17

				95,37
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.770.918.907,00	7.562.689.009,00	97,32
	Program Penanggulangan Bencana	1.989.217.012,00	1.761.466.949,00	88,55
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.652.911.325,00	11.930.519.548,12	94,29
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.413.047.244,00	21.254.675.506,12	94,83
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	12.588.368.453,00	12.084.594.198,00	96,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.612.907.916,00	15.774.982.085,00	94,96
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	240.936.681.338,00	225.747.519.255,24	93,70
	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	85.219.432,00	75.065.536,00	88,08
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	175.000,00	175.000,00	100,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	11.452.085.093,00	10.779.231.511,00	94,12
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.464.725.000,00	2.421.625.000,00	98,25
	Program Kawasan Permukiman	99.950.000,00	69.375.000,00	69,41
	Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan	2.790.380.180,00	2.410.573.508,00	86,39
	Program Penyelenggaraan	1.759.368.414,00	1.423.743.924,00	80,92
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	293.777.000,00	97,93

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.419.844.879,00	6.969.407.596,00	93,93
	Program Pemberdayaan Sosial	2.442.137.500,00	2.424.591.875,00	99,28
	Program Rehabilitasi Sosial	8.462.361.195,00	8.013.272.618,00	94,69
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	29.034.872.719,00	27.752.909.526,00	95,58
	Program Penanganan Bencana	406.514.970,00	384.279.450,00	94,53
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	206.246.543,00	205.700.696,00	99,74
10	DINAS TENAGA KERJA	17.821.218.941,00	15.198.574.510,00	85,28
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.032.875.328,00	7.622.780.101,00	94,89
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	92.775.000,00	92.475.000,00	99,68
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.679.625.102,00	4.590.184.669,00	80,82
	Program Penempatan Tenaga Kerja	774.786.474,00	710.184.000,00	91,66
	Program Hubungan Industrial	3.234.632.037,00	2.176.425.740,00	67,29
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.525.000,00	6.525.000,00	100,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	35.322.916.987,00	33.481.119.418,00	94,79
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.363.609.232,00	6.623.403.094,00	89,95
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	54.229.320,00	47.622.300,00	87,82
	Program Perlindungan Perempuan	357.650.165,00	328.471.683,00	91,84
	Program Pemenuhan Hak Anak	118.699.900,00	116.724.900,00	98,34
	Program Perlindungan Khusus Anak	267.775.000,00	244.796.250,00	91,42

	Program Pembinaan			96,12
	Keluarga Berencana (Kb)	26.332.099.810,00	25.310.224.131,00	70,12
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	83.013.600,00	81.425.000,00	98,09
	Program Pengendalian Kependudukan	745.839.960,00	728.452.060,00	97,67
	DINAS PANGAN DAN	7 10.009.900,00	720.102.000,00	
12	PERTANIAN	45.183.463.066,00	43.471.007.803,00	96,21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.772.424.061,00	29.903.390.310,00	97,18
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.328.616.490,00	1.314.443.550,00	98,93
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	108.305.155,00	106.554.400,00	98,38
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.891.683.805,00	3.725.296.590,00	95,72
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.310.873.231,00	1.297.386.340,00	98,97
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.730.515.639,00	4.699.910.738,00	99,35
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	444.909.774,00	423.010.231,00	95,08
	Program Penyuluhan Pertanian	2.596.134.911,00	2.001.015.644,00	77,08
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	134.599.355.712,00	112.034.935.744,00	83,24
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.469.857.082,00	62.145.876.700,00	77,23
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.402.159.657,00	2.221.547.782,00	92,48
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.875.536.383,00	36.788.253.433,00	92,26
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	114.676.982,00	112.269.216,00	97,90

	Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	154.663.032,00	153.009.136,00	98,93
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	149.570.248,00	149.461.404,00	99,93
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	274.504.701,00	184.806.618,00	67,32
	Program Pengelolaan Persampahan	11.158.387.627,00	10.279.711.455,00	92,13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	13.951.421.368,00	13.356.172.684,00	95,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.769.506.575,00	12.302.160.234,00	96,34
	Program Pendaftaran Penduduk	312.503.756,00	271.861.600,00	86,99
	Program Pencatatan Sipil	276.324.997,00	248.479.500,00	89,92
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	593.086.040,00	533.671.350,00	89,98
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.986.113.185,00	17.706.453.402,00	93,26
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.657.036.943,00	6.098.024.184,00	91,60
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.378.788.000,00	8.888.808.480,00	94,78
	Program Penataan Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	71.783.960,00	71.583.600,00	99,72
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	2.859.504.282,00	2.629.037.138,00	91,94

	Masyarakat Hukum Adat			
16	DINAS PERHUBUNGAN	130.419.020.375,00	120.709.531.834,00	92,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.683.178.881,00	16.680.899.514,00	94,33
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	108.351.631.681,00	99.859.382.691,00	92,16
	Program Pengelolaan Pelayaran	29.205.300,00	28.827.900,00	98,71
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	4.355.004.513,00	4.140.421.729,00	95,07
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.591.849.058,00	25.257.424.037,00	94,98
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.382.349.279,00	10.385.116.360,00	91,24
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.725.791.466,00	3.590.812.171,00	96,38
	Program Aplikasi Informatika	11.342.253.313,00	11.140.448.006,00	98,22
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	84.455.000,00	84.405.000,00	99,94
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.000.000,00	56.642.500,00	99,37
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	36.542.178.639,00	35.219.783.963,00	96,38
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.826.954.746,00	7.041.392.798,00	89,96
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.910.000,00	30.310.000,00	92,10
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	45.931.991,00	45.610.800,00	99,30
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	664.855.000,00	657.544.325,00	98,90
	Program Pengembangan UMKM	5.949.203.800,00	5.840.314.600,00	98,17

	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	365.285.544,00	360.281.910,00	98,63
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	21.657.037.558,00	21.244.329.530,00	98,09
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.414.059.599,00	12.497.371.107,00	93,17
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.546.985.599,00	10.729.304.781,00	92,92
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.263.374.000,00	1.190.274.326,00	94,21
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	354.700.000,00	337.955.200,00	95,28
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	105.000.000,00	95.836.800,00	91,27
	Program Promosi Penanaman Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	69.433.976.109,00	66.658.535.974,00	96,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.018.675.766,00	10.241.304.038,00	92,94
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.923.838.380,00	7.678.858.892,00	96,91
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	48.214.045.326,00	46.506.965.252,00	96,46
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.988.837,00	861.382.522,00	96,89
	Program Pemasaran Pariwisata	238.427.800,00	221.296.730,00	92,81

	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	148.728.540,00	99,15
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.338.503.951,00	11.021.289.315,00	97,20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.413.624.173,00	8.118.024.250,00	96,49
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.034.358.586,00	2.019.566.188,00	99,27
	Program Pengelolaan Arsip	890.521.192,00	883.698.877,00	99,23
22	DINAS PERIKANAN	18.815.705.976,00	18.096.679.835,00	96,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.163.662.435,00	6.729.789.179,00	93,94
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	155.515.385,00	155.455.250,00	99,96
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.417.118.556,00	10.155.518.552,00	97,49
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	123.162.806,00	119.527.668,00	97,05
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	956.246.794,00	936.389.186,00	97,92
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.546.125.248,00	47.408.845.698,00	95,69
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.300.799.211,00	24.815.469.690,00	98,08
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11.680.434.483,00	11.294.953.654,00	96,70
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.842.964,00	285.850.180,00	99,65
	Program Pengembangan Ekspor	2.266.429.432,00	2.208.454.756,00	97,44
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	344.817.783,00	336.257.322,00	97,52
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9.471.238.875,00	8.279.158.846,00	87,41

	Program Pengendalian			
	Izin Usaha Industri	119.137.500,00	113.776.250,00	95,50
	Kabupaten/Kota	113.121.1600,00	110.110.200,00	
	Program Pengelolaan			00.04
	Sistem Informasi Industri Nasional	76.425.000,00	74.925.000,00	98,04
	SEKRETARIAT			
24	DAERAH	341.559.720.237,00	313.834.112.216,25	91,88
	Program Penunjang			07.00
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.790.530.385,00	64.842.270.620,00	97,08
	Program Pemerintahan			
	Dan Kesejahteraan			95,46
	Rakyat	40.340.228.587,00	38.508.298.118,00	50,10
	Program Perekonomian			00.44
	Dan Pembangunan	6.186.151.488,00	5.718.542.076,00	92,44
25	SEKRETARIAT DPRD	98.613.660.476,00	87.339.422.593,00	88,57
	Program Penunjang	38.010.000.470,00	67.005.422.050,00	
	Urusan Pemerintahan	60 505 500 000 00	54.055.550.000.00	90,79
	Daerah Kabupaten/Kota	60.535.739.800,00	54.957.753.088,00	, -
	Program Dukungan			
	Pelaksanaan Tugas Dan	38.077.920.676,00	32.381.669.505,00	85,04
	Fungsi Dprd	38.011.920.010,00	32.381.009.303,00	
	BADAN PERENCANAAN			0-14
26	PEMBANGUNAN DAERAH	18.481.816.138,00	17.953.984.916,25	97,14
	Program Penunjang			96.80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	<u>,                                      </u>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan,	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00 1.259.852.810,00	96,80 97,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	·	·	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan	·	·	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	·	·	97,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25	97,05
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05 98,47
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00	97,05 98,47 95,74
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25	97,05 98,47
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00	97,05 98,47 95,74
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00 822.462.794.955,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00 <b>803.820.604.683,00</b>	97,05 98,47 95,74
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00	97,05 98,47 95,74 <b>97,73</b>
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00 <b>822.462.794.955,00</b> 17.435.775.010,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00 803.820.604.683,00 16.817.819.972,00	97,05 98,47 95,74 <b>97,73</b>
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00 822.462.794.955,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00 <b>803.820.604.683,00</b>	97,05 98,47 95,74 <b>97,73</b>
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan	1.298.209.300,00 4.028.746.548,00 621.187.603,00 <b>822.462.794.955,00</b> 17.435.775.010,00	1.259.852.810,00 3.967.241.881,25 594.718.925,00 803.820.604.683,00 16.817.819.972,00	97,05 98,47 95,74 <b>97,73</b>

28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	59.022.404.426,00	53.171.751.245,00	90,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.907.854.764,00	43.105.009.006,00	91,89
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.114.549.662,00	10.066.742.239,00	83,10
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.231.116.399,00	13.928.568.083,00	91,45
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.378.708.527,00	10.878.894.309,00	95,61
	Program Kepegawaian Daerah	2.284.384.680,00	1.697.805.600,00	74,32
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.568.023.192,00	1.351.868.174,00	86,21
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	107.687.205.631,00	100.948.078.960,00	93,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.639.037.824,00	6.056.576.204,00	91,23
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.956.317.423,00	1.930.438.000,00	98,68
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan LembagaPendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.435.499.200,00	5.382.642.432,00	51,58
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85.495.968.215,00	84.592.629.114,00	98,94
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	418.609,00	417.500,00	99,74
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.159.964.360,00	2.985.375.710,00	94,47
31	INSPEKTORAT	94.645.194.486,00	89.707.039.287,00	94,78
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.269.011.008,00	16.554.839.794,00	95,86

	Program			
	Penyelenggaraan	1 = 00 005 000 00	1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71,65
	Pengawasan	1.500.906.893,00	1.075.360.250,00	,
32	KECAMATAN			95,38
34	SIDOARJO	31.785.694.578,00	30.315.618.502,00	95,56
	Program Penunjang			
	Urusan Pemerintahan	22.742.480.456,00	21.812.882.620,00	95,91
	Daerah Kabupaten/Kota	22.1.12.1.00.1.00,00	21.012.002.020,00	
	Program			
	Penyelenggaraan	1 020 207 727 00	625 627 617 00	61,69
	Pemerintahan Dan	1.030.397.727,00	635.627.617,00	,
	Pelayanan Publik			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan			98,38
	Kelurahan	7.563.263.855,00	7.440.705.725,00	90,30
	Program Koordinasi			
	Ketentraman Dan			99,29
	Ketertiban Umum	70.857.500,00	70.357.500,00	JJ,2J
	Program			
	Penyelenggaraan Urusan	150 140 540 00	150 140 540 00	100,00
	Pemerintahan Umum	159.142.540,00	159.142.540,00	<b>,</b>
	Program Pembinaan Dan			
	Pengawasan	210 552 500 00	196.902.500,00	89,68
	Pemerintahan Desa	219.552.500,00	190.902.300,00	
33	KECAMATAN CANDI	6.518.710.743,00	6.056.074.417,00	92,90
33	RECAMATAN CANDI Program Penunjang	6.518.710.743,00	6.056.074.417,00	92,90
33				<b>92,90</b> 93,16
33	Program Penunjang	<b>6.518.710.743,00</b> 5.785.176.686,00	<b>6.056.074.417,00</b> 5.389.527.822,00	·
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program			·
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan			·
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00	93,16
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00	93,16 90,45 86,22
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00	93,16
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00	93,16 90,45 86,22 99,66
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00	93,16 90,45 86,22
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  KECAMATAN	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00	93,16 90,45 86,22 99,66
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum KECAMATAN BUDURAN	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00 <b>5.618.723.545,00</b>	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00 5.039.411.350,00	93,16 90,45 86,22 99,66
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  KECAMATAN BUDURAN Program Penunjang	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00	93,16 90,45 86,22 99,66 <b>89,69</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  KECAMATAN BUDURAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00 <b>5.618.723.545,00</b>	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00 5.039.411.350,00	93,16 90,45 86,22 99,66 <b>89,69</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  KECAMATAN BUDURAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00 5.618.723.545,00 5.439.023.948,00	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00 5.039.411.350,00 4.877.503.050,00	93,16 90,45 86,22 99,66 <b>89,69</b> 89,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  KECAMATAN BUDURAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program	5.785.176.686,00 631.794.057,00 46.790.000,00 54.950.000,00 <b>5.618.723.545,00</b>	5.389.527.822,00 571.444.095,00 40.340.000,00 54.762.500,00 5.039.411.350,00	93,16 90,45 86,22 99,66 <b>89,69</b>

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.855.500,00	44.158.500,00	94,24
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.297.540,00	20.212.000,00	94,90
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.312.500,00	5.260.000,00	99,01
35	KECAMATAN WONOAYU	5.822.629.487,00	5.432.130.290,00	93,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.018.848.590,00	4.737.113.062,00	94,39
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	521.238.397,00	470.324.728,00	90,23
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	169.615.000,00	125.765.000,00	74,15
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.802.500,00	56.802.500,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.125.000,00	42.125.000,00	75,06
36	KECAMATAN KRIAN	10.743.827.355,00	9.962.199.335,00	92,72
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.457.888,00	8.681.998.610,00	95,76
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	270.570.397,00	156.198.231,00	57,73
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.046.092.500,00	1.029.907.500,00	98,45
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	193.956.570,00	57.044.994,00	29,41
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.475.000,00	15.275.000,00	18,52
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.275.000,00	21.775.000,00	25,84
37	KECAMATAN PORONG	10.174.734.834,00	8.910.003.964,00	87,57

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.305.000,00	30.925.000,00	87,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	545.121.557,00	269.633.850,00	49,46
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.427.599.213,00	3.987.549.877,00	90,06
39	KECAMATAN JABON	5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	85,53
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97.226.000,00	97.070.000,00	99,84
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	87.353.500,00	85.858.500,00	98,29
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	552.934.057,00	530.903.950,00	96,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.032.679.601,00	4.776.310.011,00	94,91
38	KECAMATAN KREMBUNG	5.775.943.158,00	5.495.892.461,00	95,15
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.850.000,00	8.150.000,00	92,09
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.746.800,00	97.171.800,00	95,50
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	81.150.000,00	69.217.500,00	85,30
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.131.175.000,00	1.085.863.699,00	95,99
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	453.592.850,00	337.545.100,00	74,42
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.398.220.184,00	7.312.055.865,00	87,07

	Program Penyelenggaraan Urusan	22.537.500,00	14.500.000,00	64,34
	Pemerintahan Umum	22.007.000,00	11.300.000,00	
40	KECAMATAN BALONGBENDO	5.679.860.163,00	5.035.184.363,00	88,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.716.028.956,00	4.465.203.763,00	94,68
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	851.906.207,00	458.670.600,00	53,84
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.587.500,00	41.387.500,00	99,52
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.337.500,00	69.922.500,00	99,41
41	KECAMATAN TARIK	5.701.561.656,00	4.926.752.121,00	86,41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.746.342.599,00	4.354.279.871,00	91,74
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	644.134.057,00	384.780.750,00	59,74
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	293.310.000,00	171.111.500,00	58,34
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.775.000,00	16.580.000,00	93,28
42	KECAMATAN TAMAN	19.607.565.441,00	18.407.733.428,00	93,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.981.593.734,00	13.364.493.428,00	95,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	508.556.807,00	339.996.844,00	66,86
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.435.957.205,00	4.227.575.656,00	95,30
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	429.272.500,00	269.937.500,00	62,88

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.325.195,00	62.235.000,00	98,28
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.860.000,00	143.495.000,00	75,98
43	KECAMATAN WARU	6.073.141.123,00	5.496.452.494,00	90,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.966.831,00	4.836.781.700,00	92,02
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	671.847.645,00	515.094.147,00	76,67
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71.481.122,00	70.731.122,00	98,95
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	44.618.600,00	44.618.600,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.226.925,00	29.226.925,00	100,00
44	KECAMATAN GEDANGAN	6.693.906.566,00	C 157 000 504 00	91,98
	<u> </u>	0.093.900.300,00	6.157.303.594,00	7 - , 7 0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.478.465.909,00 590.192.657,00	5.197.826.144,00 459.897.150,00	94,88 77,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan	5.478.465.909,00 590.192.657,00 78.975.000,00	5.197.826.144,00 459.897.150,00 76.425.000,00	94,88 77,92 96,77
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan	5.478.465.909,00 590.192.657,00 78.975.000,00 86.810.500,00	5.197.826.144,00 459.897.150,00 76.425.000,00 85.740.300,00	94,88 77,92 96,77 98,77
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.478.465.909,00 590.192.657,00 78.975.000,00 86.810.500,00 459.462.500,00	5.197.826.144,00 459.897.150,00 76.425.000,00 85.740.300,00 337.415.000,00	94,88 77,92 96,77 98,77 73,44

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	80.948.750,00	67.886.750,00	83,86
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.387.690,00	62.737.500,00	93,10
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.168.400,00	8.118.000,00	99,38
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.204.807.923,00	5.753.329.449,00	92,72
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.561.402.923,00	5.260.534.449,00	94,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	541.905.000,00	393.745.000,00	72,66
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			#DIV/0!
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.500.000,00	99.050.000,00	97,59
47	KECAMATAN TULANGAN	6.056.499.664,00	5.643.355.256,00	93,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.818.176.857,00	5.415.715.475,00	93,08
			,	,
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	136.296.557,00	128.259.825,00	94,10
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	136.296.557,00 73.710.000,00		<u> </u>
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	,	128.259.825,00	94,10
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.710.000,00	128.259.825,00 71.109.956,00	94,10
48	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan	73.710.000,00	128.259.825,00 71.109.956,00 21.670.000,00	94,10 96,47 99,79

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	501.375.000,00	291.514.900,00	58,14
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	37.150.000,00	36.805.500,00	99,07
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51
49	KECAMATAN SUKODONO	6.351.379.258,00	5.694.780.215,00	89,66
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.838.244.451,00	5.355.651.965,00	91,73
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	362.071.557,00	228.065.000,00	62,99
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126.920.000,00	86.920.000,00	68,48
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.743.250,00	12.743.250,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	JUMLAH	6.683.181.703.425,00	6.189.599.103.262,10	92,61

Realisasi anggaran tahun 2023 pada 120 program/kegiatan tersebut diatas, rata-rata realisasi capaian nya adalah **92,61%** dengan capaian kinerja rata-rata **103,20%**. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut telah terjadi efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran sebesar **10,26%** mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.



# BAB IV PENUTUP

# 4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 6 tujuan dengan 9 Indikator Tujuan, 7 indikator telah tercapai dengan nilai capaian 100% keatas dan 2 indikator belum tercapai atau dengan nilai dibawah 100%. Namun demikian secara keseluruhan indikator tujuan tersebut masih masuk dalam katagori **Sangat Baik** atau dengan nilai diatas 90,01%, dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 9 indikator tersebut sebesar **117,78%.** 

Sedangkan berkenaan dengan capaian kinerja sasaran yang terdiri dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran, maka terdapat 17 indikator telah tercapai, 12 tidak tercapai dan 2 indikator belum ada release dari Kementerian Lembaga terkait. Namun demikian dari 12 indikator yang tidak tercapai tersebut, ada 9 indikator bernilai diatas 90,01% atau katagori Sangat Baik. Sehingga bila dijumlah secara keseluruhan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran dinilai Sangat Baik, 1 (satu) indikator katagori Baik, 2 (dua) indikator dalam katagori Kurang dan 2 (dua) indikator yang belum direlease hasilnya oleh Kementerian atau lembaga terkait.

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.683.181.703.425,00** dan terealisasi sebesar **6.189.599.103.262,10** atau tercapai **92,61%** yang terbagi dalam 120 Program kegiatan. Dengan demikian jika dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja sasaran sebesar **103,20%**, maka didapat **efisiensi** sumber daya anggaran sebesar **10,26%**, sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut sangat mendukung ketercapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

# 4.2. TINDAKLANJUT

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Baik dan Baik akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori kurang akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang. Berikut indicator sasaran yang masuk katagori Kurang, antara lain :

# 1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Pada tahun 2023 Nilai Investasi Daerah di Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.13.681.823.120.000,00 dari target Rp.7.396.748.810.000,00 dan tercapai 184,97%. Namun Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yaitu senilai Rp.14.086.231.612.109,50 maka terdapat penurunan senilai Rp.404.408.492.109,50 atau sekitar -(2,87%). Penurunan nilai investasi tersebut disebabkan karena kurang tertibnya perusahaan yang memiliki investasi dalam melaporkan nilai investasinya kepada PD terkait, sehingga akan lambat pula dalam penyampaian laporan ke BKPM / Pusat.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan Nilai Investasi antara lain :

- Terus berupaya memberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi bagi investor dengan melalui kemudahan perijinan dan sebagainya;
- memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Jemput Bola untuk UMKM di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Perbankan, KPP Pratama, dan Halal Center; serta Tim Prime Service untuk membantu perusahaanperusahaan yang dipilih dan diprioritaskan;
- Melakukan kolaborasi yang baik antara dinas teknis pemangku perizinan berusaha dan instansi teknis terkait penerbitan perizinan, serta komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim dan Kementerian;
- Pemberian insentif

# Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas tahun 2023 dengan capaian 1,67 dari target 2,82 tercapai 59,22% katagori Kurang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2,27 mengalami

2. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas

penurunan sebesar 0,6. Namun demikian nilaiya sangat kecil. Hal tersebut disebabkan produksi maupun produktivitas pertanian cenderung kecil dan menurun karena luas lahan di sektor pertanian serta menurunnya investasi dibidang pertanian karena masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Menyikapi hal tersebut,



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mempertahankan luas lahan pertanian produktif yang masih ada, serta melalui dinas terkait terus memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar tetap besemangat mengelola lahan pertaniannya sehingga lahannya tidak dijual dan beralih fungsi.



# **LAMPIRAN**

# 1. Perjanjian Kinerja



# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD MUHDLOR, S.IP.**Jabatan : **BUPATI SIDOARJO** 

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, 2 Nopember 2023

**BUPATI SIDOARJO** 



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

AHMAD MUHDLOR, S.IP.





# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
	Tujuan 1 :		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	ВВ
1	Terselenggaranya Tata Kelola	Nilai SAKIP Kabupaten	Α
	Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Opini Atas Laporan BPK	WTP
	i angkas Berbasis Digital	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,45
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-
	Misi 2:		
	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		
	Tujuan 2 :		
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan	Pertumbuhan Ekonomi	2,89
	Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Indeks Gini	0,347
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,22



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

	T.		
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	52,81
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,82
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,25
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,98
		Persentase Koperasi Berkualitas	24,69
		Persentase Desa Mandiri	13,98
	Tujuan 3 :	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,09
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,4
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,91
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,60
	Misi 3:		
	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan		
	Tujuan 4:	Indaka Infrastruktur	0.770
	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,81
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,760
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,60
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	51,54
	dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Udara	85,16
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,12
		Indeks Resiko Bencana	92,53
	Misi 4:		
	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya		
	Tujuan 5 :		
	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,92

	ř.		
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,41
	Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,23
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,19
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,95
	Misi 5:		
	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan 6 :		
	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	85,00
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan	Indeks Toleransi	80,22
	agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Pelestarian Budaya	63,58
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	78,97

#### JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

JUMLAF	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023		p
NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.428.246.153.179,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	746.534.195.082,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendidikan	681.272.690.897,00	APBD
	Program Pengembangan Kebudayaan	38.722.200,00	APBD
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	297.600.000,00	APBD
	Program Pengendalian Perijinan	2.945.000,00	APBD
2	DINAS KESEHATAN	489.464.324.520,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	267.421.409.696,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	208.290.678.287,00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.435.043.300,00	APBD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.162.914,00	APBD

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.086.954.021,00	APBD
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	688.624.253.730,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	667.288.701.730,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.335.552.000,00	
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	124.737.626.551,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.214.412.904.,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.743.877.285,00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.779.336.362,00	APBD
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	389.763.719.451,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.157.327.818,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.015.509.714,00	APBD
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	58.215.308.394,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Jalan	295.375.573.525,00	APBD
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	115.593.739.345,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	51.782.872.477,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.384.036.121,00	APBD
	Program Pengembangan Permukiman	27.240.249.684,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Gedung	3.383.903.561,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.759.368.414,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.850.774.383,00	APBD
	Program Pengembangan Perumahan	2.790.380.180,00	APBD
	Program Kawasan Permukiman	99.950.000,00	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	175.000,00	APBD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	11.452.085.093,00	APBD

	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	85.219.432,00	APBD
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.201.276.369,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.612.907.916,00	APBD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	12.588.368.453,00	APBD
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.393.047.244,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.652.911.325,00	APBD
	Program Penanggulangan Bencana	1.989.217.012,00	APBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.750.918.907,00	APBD
9	DINAS SOSIAL	47.971.977.806,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.419.844.879,00	APBD
	Program Pemberdayaan Sosial	2.442.137.500,00	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	8.462.361.195,00	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	29.034.872.719,00	APBD
	Program Penanganan Bencana	406.514.970,00	APBD
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	206.246.543,00	APBD
10	DINAS TENAGA KERJA	17.814.693.941,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.032.875.328,00	APBD
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	92.775.000,00	APBD
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.679.625.102,00	APBD
	Program Penempatan Tenaga Kerja	774.786.474,00	APBD
	Program Hubungan Industrial	3.234.632.037,00	APBD
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.525.000,00	APBD
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	35.322.916.987,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.383.609.232,00	APBD

	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	54.229.320,00	APBD
	Program Perlindungan Perempuan	357.650.165,00	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak	118.699.900,00	APBD
	Program Perlindungan Khusus Anak	267.775.000,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	17.215.423.000,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	83.013.600,00	APBD
	Program Pengendalian Kependudukan	745.839.960,00	APBD
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	45.183.463.066,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.772.424.061,00	APBD
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.328.616.490,00	APBD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	108.305.155,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.891.683.805,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.310.873.231,00	APBD
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.730.515.639,00	APBD
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	444.909.774,00	APBD
	Program Penyuluhan Pertanian	2.596.134.911,00	APBD
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	134.599.355.712,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.469.857.082,00	APBD
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.402.159.657,00	APBD
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.875.536.383,00	APBD
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	114.676.982,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	154.663.032,00	APBD
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	149.570.248,00	APBD
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	274.504.701,00	APBD

	Program Pengelolaan Persampahan	11.158.387.627,00	APBD
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	13.951.421.368,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.769.506.575,00	APBD
	Program Pendaftaran Penduduk	312.503.756,00	APBD
	Program Pencatatan Sipil	276.324.997,00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	593.086.040,00	APBD
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.986.113.185,00	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.657.036.943,00	APBD
	Program Penataan Desa	19.000.000,00	APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	71.783.960,00	APBD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.859.504.282,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	7.214.670.519,00	APBD
16	DINAS PERHUBUNGAN	130.419.020.375,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.683.178.881,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	108.351.631.681,00	APBD
	Program Pengelolaan Pelayaran	29.205.300,00	APBD
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	4.355.004.513,00	APBD
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.591.849.058,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.382.349.279,00	APBD
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.725.791.446,00	APBD
	Program Aplikasi Informatika	11.342.253.313,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	84.455.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.000.000,00	APBD
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	36.542.178.639,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.826.954.746,00	APBD

		Т	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.910.000,00	APBD
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	45.931.991,00	APBD
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	664.855.000,00	APBD
	Program Pengembangan UMKM	5.949.203.800,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	365.285.544,00	APBD
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	21.657.037.558,00	APBD
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.414.059.599,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.546.985.599,00	APBD
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.263.374.000,00	APBD
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	354.700.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	72.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	105.000.000,00	APBD
	Program Promosi Penanaman Modal	72.000.000,00	APBD
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	69.433.976.109,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.018.675.766,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.923.838.380,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	48.214.045.326,00	APBD
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.988.837,00	APBD
	Program Pemasaran Pariwisata	238.427.800,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	APBD
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.338.503.951,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.413.624.173,00	APBD
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.034.358.586,00	APBD
	Program Pengelolaan Arsip	890.521.192,00	APBD
		1	

		Magazina and American and Ameri	,
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.163.662.435,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	155.515.385,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.417.118.556,00	APBD,DAK
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	123.162.806,00	APBD
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	956.246.794,00	APBD
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.336.325.248,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	119.137.500,00	APBD
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	76.425.000,00	APBD
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	25.300.799.211,00	APBD
	Program Pengembangan Ekspor	11.680.434.483,00	APBD
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.266.429.432,00	APBD
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	344.817.783,00	APBD
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	9.471.238.875,00	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	77.042.964,00	APBD
24	SEKRETARIAT DAERAH	113.316.910.460,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.790.530.385,00	APBD
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.340.228.587,00	APBD
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.186.151.488,00	APBD
25	SEKRETARIAT DPRD	98.613.660.476,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.535.739.800,00	APBD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	38.077.920.676,00	APBD
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.481.816.138,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.533.672.687,00	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.298.209.300,00	APBD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.028.746.548,00	APBD
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	621.187.603,00	APBD

27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	822.692.594.955,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.435.775.010,00	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	800.510.634.708,00	APBD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.746.185.237,00	APBD
28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	59.022.404.426,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.907.854.764,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.114.549.662,00	APBD
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.231.116.399,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.378.708.527,00	APBD
	Program Kepegawaian Daerah	2.284.384.680,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.568.023.192,00	APBD
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	107.687.205.631,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.639.037.824,00	APBD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.956.317.423,00	APBD
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan LembagaPendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.435.499.200,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85.495.968.215,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	418.609,00	APBD
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.159.964.360,00	APBD
31	INSPEKTORAT	18.769.917.901,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.269.011.008,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.500.906.893,00	APBD
32	KECAMATAN SIDOARJO	31.785.694.578,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.742.480.456,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.030.397.727,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.563.263.855,00	APBD

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70.857.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	159.142.540,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	219.552.500,00	APBD
33	KECAMATAN CANDI	6.518.710.743,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.785.176.686,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	631.794.057,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.790.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.950.000,00	APBD
34	KECAMATAN BUDURAN	5.618.723.545,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	5.439.023.948,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.234.057,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.855.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.297.540,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.312.500,00	APBD
35	KECAMATAN WONOAYU	5.822.629.487,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.018.848.590,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	521.238.397,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	169.615.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.802.500,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.125.000,00	APBD
36	KECAMATAN KRIAN	10.743.827.355,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.457.888,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	270.570.397,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.046.092.500,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	193.956.570,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.475.000,00	APBD

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.275.000,00	APBD					
37	KECAMATAN PORONG	10.165.884.834,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.398.220.184,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	453.592.850,00	APBD					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.122.325.000,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	81.150.000,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.746.800,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.850.000,00	APBD					
38	KECAMATAN KREMBUNG	5.775.943.158,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.032.679.601,00	5.032.679.601,00 APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	552.934.057,00	552.934.057,00 APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	87.353.500,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97,226,000,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,750,000,00	APBD					
39	KECAMATAN JABON	5.030.563.270,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	4.427.599.213,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	545.121.557,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.305.000,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.537.500,00 APBD						
40	KECAMATAN BALONGBENDO	5.679.860.163,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.716.028.956,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	851.906.207,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.587.500,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.337.500,00	APBD					
41	KECAMATAN TARIK	5.701.561.656,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.746.342.599,00	APBD					

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	644.134.057,00	APBD				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	293.310.000,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.775.000,00	APBD				
42	KECAMATAN TAMAN	19.607.565.441,00					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.981.593.734,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	508.556.807,00	APBD				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.435.957.205,00	APBD				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	429.272.500,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.325.195,00 APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.860.000,00	APBD				
43	KECAMATAN WARU	6.073.141.123,00					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.966.831,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	671.847.645,00	APBD				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71.481.122,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	44.618.600,00	APBD				
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.226.925,00	APBD				
44	KECAMATAN GEDANGAN	6.693.906.566,00					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.478.465.909,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	590.192.657,00	APBD				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.975.000,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.810.500,00	APBD				
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	459.462.500,00	APBD				
45	KECAMATAN SEDATI	5.856.966.340,00					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.115.794.943,00	APBD				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	584.666.557,00	APBD				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	80.948.750,00	80.948.750,00 APBD				

	·		n/					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.387.690,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.168.400,00	APBD					
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.204.807.923,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.561.402.923,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	541.905.000,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.500.000,00	APBD					
47	KECAMATAN TULANGAN	6.056.499.664,00	5.818.176.857.00					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.818.176.857,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	136.296.557,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	73.710.000,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.716.250,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.600.000,00	APBD					
48	KECAMATAN PRAMBON	5.869.661.334,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.288.148.834,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	501.375.000,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	37.150.000,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.887.500,00	APBD					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.100.000,00	APBD					
49	KECAMATAN SUKODONO	6.351.379.258,00						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.838.244.451,00	APBD					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	362.071.557,00	APBD					
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126.920.000,00	APBD					



TOTAL ANGGARAN	5.367.125.179.233,00	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.400.000,00	APBD
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.743.250,00	APBD

Sidoarjo, 2 Nopember 2023

# **BUPATI SIDOARJO**

Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

AHMAD MUHDLOR, S.IP.



# 2. RENCANA AKSI

Dokumen lengkap dapat dilihat pada link :

https://drive.google.com/file/d/1ZTivU\_Rxm0LHA-\_xWuytt310SZrABN3E/view?usp=drive\_link

	RENCANA AKSI SAKIP TAHUN 2024										
No		asil Evaluasi / LHE SAKIP 2023	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target		tu Pe			Penanggung Jawab	Status / Progress penyelesaian
		Perjanjian Kinerja level Perangkat Daerah memasukkan tujuan strategis Renstra sebagai	Melakukan reviu dan perbaikan secara menyeluruh pada dokumen perencaan yang ada pada level Perangkat Derah dengan memperhatikan keselarasan dokumen perencaan yang ada di level PD, mulai dari Renstra sampai kepada SKP individu pegawai. Serta, memastikan seluruh	sebagai kinerja individu 2. Dialog Kinerja dan Penilaian Kinerja Perangka Daerah oleh Tim Penilai yang dihadiri oleh	1. PK 49 PD 2. LHE SAKIP 49 PD				V	ORGANISASI, BAPPEDA, BKD	1. Telah dilaksanakan desk PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 pada tanggal 9 & 10 Januari 2024 di BAPPEDA 2. Telah dilaksanakan penandatanganan PK tahun 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah 3. Telah dilaksanakan dialog kinerja Penilaian Kinerja Perangka Daerah oleh Tim Penilai yang dihadiri oleh kepala Perangkat Daerah

# 3. RPJMD

Dokumen lengkap dapat dilihat pada link :

https://drive.google.com/file/d/1ze2cXyA7WDAETvQxeJItkda765Fv44hG /view?usp=drive link



#### BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMER 2 TARLES 2021

#### TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

#### BUPATI SIDOARJO.

Monimbang : bahwa untuk melakasmakan ketentuan Pasai 264 apat (1) Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagainana telah dishah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahua 2015 tentang Perchahan Kelisa size Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan Daersoh, perki menetapkan Peraturan Daerah tentang Sencara Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun-2021-2026

- Monginger : I. Found 18 synt (6) Undersy-Undang Daner Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djewa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Namor 41), sebegainung teleh disheh dengen Undang-Undang Numor 2 Tahun 1965 tentang Peruhahan Satas Wilayah Kerapraja Suraheya dan Daerah Tingkat II Suraheya dengan Mengubah Undang-Undang Nessor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Sesar dalam Lingkungan Propinsi Jews Timur, Jawa Tengah, Jawa Harat, dan Daerah. latimesa Jagukara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2730);
  - 3. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Kesangan Negara flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notner 42866c
  - 4. Undang-Undang Namor 25 Tahun 2004 tentung Sistem Personanan Pembangunan Nasional Lumbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2004 Numur 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

# 4. RKPD

Dokumen lengkap dapat dilihat pada link :

https://drive.google.com/file/d/1WCT4KmlLpSpGAzZpo4TUPgR3f1mL E Lt/view?usp=drive link



#### BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIDOARJO.

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan antara lain berupa peruhahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - b. babwa sesusi ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencansan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penaturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingst : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diabah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Menguhah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

## 5. IKU

Dokumen lengkap dapat dilihat pada link:

https://drive.google.com/file/d/1O\_CTFgZwIRtbrrIh6qk2NgOb2Dtc3e OV/view?usp=drive\_link



#### BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/542 /438.1.1.3/2022

#### TENTANG

INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH SERTA 17 PROGRAM STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIDOARJO,

Memimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi hasil percepatan pencapatan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah serta 17 Program Strategia, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bidoarjo tentang Informasi Mamual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Serta 17 Program Strategia Rancana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Ketapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Keta Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2730);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234|, sebagaimana telah diubah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

## 6. PEDOMAN PERENCANAAN

Dokumen lengkap dapat dilihat pada link:

https://drive.google.com/file/d/17RTEr-Fs2bBmKtS5Eywn3YOi0DIk7Zq0/view?usp=drive\_link



#### BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2016

#### TENTANG

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang terarah dan berbasis aspirasi masyarakat, diperlukan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287):
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



# 7. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

 Pada tanggal 12 Januari 2023 Menerima piagam Penghargaan Kategori Terbaik ke-5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Lapangan Bola Prapat Kurung, Perak Timur, Surabaya.



 Pada tanggal 28 Februari 2023 Menerima Penghargaan Adipura Kategori Kota Sedang dari Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta





3. Pada tanggal 14 Maret 2023 Mendapat Penghargaan UHC (Universal Health Coverage) dari Wapres RI karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di Balai Sudirman, Jakarta.



4. Pada tanggal 15 Maret 2023 Mendapat Penghargaan dari Radar Sidoarjo sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan Infrastruktur dalam Radar Sidoarjo Award 2023, di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo





5. Pada tanggal 29 April 2023 Mendapat Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah (PPD) Kinerja Terbaik Nasional peringkat ke – 5, pada Peringatan Hari Otonomi Daerah )Otoda) ke- 27, di Anjungan City of Makassar



6. Pada tanggal 25 Mei 2023 Meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10x Berturut-turut atas LHP LKPD T.A. 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diterima di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur.





7. Pada tanggal 29 Mei 2023 Meraih Penghargaan E-Purchasing Award atas nilai transaksi terbanyak dalam pemanfaatan barang/jasa melalui e-katalog lokal Kabupaetn/Kota Tahun 2023, dari Gubernur Jatim, di Grand City, Surabaya.



- 8. Pada tanggal 16 Juni 2023 Meraih The 1st Indonesia GPR Awards 2023 (IGA) sebagai pemimpin terpopuler di Media Pemberitaan Online dari Humas Indonesia, diberikan di Hotel Clora, Makassar.
- Pada tanggal 12 Agustus 2023 Meraih Jasa Bakti Memajukan Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, di Jogjakarta.
- 10. Pada tanggal 29 Oktober 2023 Meraih Penghargaan "Inspirational Regional Head Who Mobilizies Youth" sebagai Pimpinan Daerah Yang Menginspirasi dan Penggerak Para Kaum Muda, dari Media Kabarpas, di Luminor Hotel, Sidoarjo.
- 11. Pada tanggal 13 November 2023 Mendapatkan Apresiasi dari Yankes Kemenkes dr. Azhar Jaya, S.H., SKM., MARS atas predikat Kelas A RSUD Sidoarjo, di Sidoarjo.
- 12. Pada tanggal 16 November 2023 Meraih Juara I Penyelenggara Pelayanan Kesehata Tradisional yang Cemerlang, Efektif, Responsif, Inovatif, dan Akurat



Tradisional (Pelita Ceria) se – Jatim, di Batu, pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59

13. Pada tanggal 11 Desember 2023 Mendapatkan Penghargaan Dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jawa Timur, di Surabaya dengan kategori Pembina Terbaik Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)



14. Pada tanggal 12 Desembr 2023 Kabupaten Sidoarjo Dinobatkan Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2023 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

